



TAHUN
2021



LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017–2022, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST



Sebagai unsur penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas Birokrasi Publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan riil masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah pelayan publik atau *public server* harus bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2021 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021. LKIP ini merupakan representasi dari hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini, karena OPD yang dibentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam bentuk program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja 2021. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKIP ini mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dan upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Upaya-upaya atau *effort* yang dilakukan dalam pencapaian kinerja untuk mewujudkan dan mencapai sasaran pembangunan pada masing-masing Bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah dilaksanakan secara *powerfull* dengan tingkat pencapaian yang bervariasi. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki tergolong berhasil. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

NO	MISI	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	SKALA ORDINAL
Misi I : Selamatkan Orang Muda Flores Timur			
Terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 37 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	52,73	Kurang
2.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	152,91	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan	100	Baik
4.	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	111,37	Baik Sekali
5.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	78,12	Baik
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Atas Kesejahteraan Sosial	42,54	Kurang
7.	Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	69,77	Cukup
Rata-rata Misi I		86,77	Baik
Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 17 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Kinerja Transportasi	60,99	Cukup
2.	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	58,9	Cukup
3.	Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	100	Baik
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	100	Baik
5.	Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman	76,13	Baik

6.	Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota	100	Baik
Rata-rata Misi II		82,67	Baik

Misi III : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur.			
Terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja			
1.	Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	66,84	Cukup
2.	Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	100	Baik
Rata- rata Misi III		83,42	Baik
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	100	Baik
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	53,46	Kurang
Rata-rata Misi IV		76,73	Baik
Misi V : Reformasi Birokrasi			
Terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	86,06	Baik
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	203,4	Baik Sekali
Rata rata Misi V		144,73	Baik Sekali
Rata-rata Misi I – V		94,86	Baik

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun ketiga periode Pembangunan Lima Tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi tahapan yang baik untuk RPJMD tahap berikutnya demi terciptanya pembangunan yang diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	Ii
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	Vi
DAFTAR TABEL	Vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	16
1.4 Sistematika	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategi Tahun 2017-2022	22
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	40
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	47
3.2 Analisis Capaian	50
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	91
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran Tindak Lanjut	94
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	97
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2021	98
3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	102
4. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Kabupaten Flores Timur	109
5. SOP Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur	131



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur	
Tahun 2015	2
1.2 Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun	
2015 – 2019	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021	3
1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2021	4
1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	5
1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2021	6
1.5 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	7
1.6 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019	9
1.7 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020	10
1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	15
1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021	15
1.10 Data Jabatan Sturktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong	16
2.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	31
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur	36
2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	41
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2021	44
3.1 Skala Pengukuran Ordinal	48
3.2 Pencapaian Indikator Sasaran	49
3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	49
3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian Orang Muda	51
3.5 Program Pendukung dan Anggaran 2021 Sasaran 1	52
3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	53
3.7 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	53



Sasaran 2	
3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan	54
3.9 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 3	54
3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	55
3.11 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 4	59
3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	59
3.13 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2021	62
3.14 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 5	63
3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial	64
3.16 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 6	64
3.17 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	66
3.18 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 7	66
3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatkan Kinerja Transportasi	67
3.20 Program Pendukung dan Anggaran tahun 2021	
Sasaran 8	67
3.21 Analisis Pencapaian Sasaran 9 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya	68
3.22 Program Pendukung dan Anggaran 2021 Sasaran 9	69
3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 10 Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam	70
3.24 Program Pendukung dan Anggaran 2021 Sasaran 10	70
3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	71
3.26 Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021	
Sasaran 11	72
3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman	73

3.28	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021 Sasaran 12	74
3.29	Analisis Pencapaian Sasaran 13 Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	75
3.30	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021 Sasaran 13	75
3.31	Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	76
3.32	Program Pendukung dan Anggaran 2021 Sasaran 14	80
3.33	Analisis Pencapaian Sasaran 15 Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah	80
3.34	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2021 Sasaran 15	81
3.35	Analisis Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	82
3.36	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2021 Sasaran 16	83
3.37	Analisis Pencapaian Sasaran 17 Meningkatnya Produksi Perikanan	83
3.38	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2021 Sasaran 17	85
3.39	Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	85
3.40	Program Pendukung dan Anggaran tahun 2021 Sasaran 18	89
3.41	Analisis Pencapaian Sasaran 19 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	90
3.42	Program Pendukung dan Anggaran Tahun 2021 Sasaran 19	91
3.43	Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2021	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

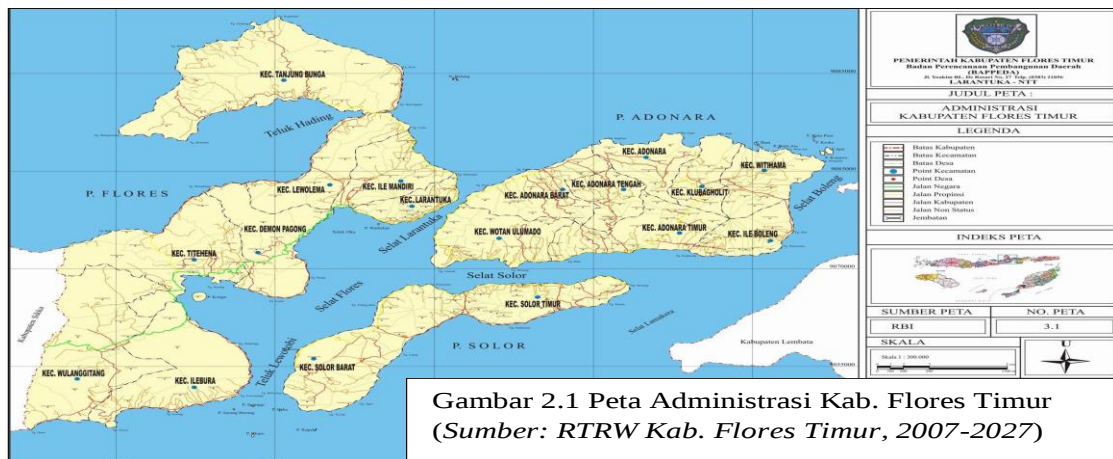
1.2.1 Kondisi Geografi

Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08° 40'LS dan 122°38'-123°57'BT. Dengan luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah), dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Flores Timur
(Sumber: RTRW Kab. Flores Timur, 2007-2027)

Topografi Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan 12 %, ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Tingkat Kondisi wilayah geografis yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung yaitu gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan, gunung Leraboleng di Pulau Flores dan gunung Ile Boleng di Pulau Adonara. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter perdetik. Sumber mata air

tersebut umumnya berada pada kawasan hutan dengan luas 44,390,78 Ha. Kondisi klimatologi mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni 257,57 km² (14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur), sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
	1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Flores Timur Daratan		72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,58	1,74
Solor		38	1	226,34	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihama	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,45
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,58	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebanyak 293,590 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1.812,58 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 162 Jiwa/Km². Dengan kepadatan sebesar ini, sebenarnya Flores Timur belum menghadapi masalah kependudukan. Akan tetapi kalau dilihat dari potensi alam yaitu lahan kering yang tidak subur, lahan sawah yang tidak berpengairan dan sedikit lahan sawah yang berpengairan maka Flores Timur juga menghadapi masalah kependudukan.

Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Wulanggitang	225,85	7,740	7,827	15,567	61 Jiwa/Km ²
Titehena	154,84	6,950	7,050	14,000	288 Jiwa/Km ²
Larantuka	48,91	20,822	20,868	41,690	197 Jiwa/Km ²
Ile Mandiri	72,76	6,091	6,083	12,174	212 Jiwa/Km ²
Tanjung Bunga	257,57	7,770	7,757	15,527	143 Jiwa/Km ²
Solor Barat	128,20	5,713	6,126	11,839	156 Jiwa/Km ²
Solor Timur	66,56	8,456	8,827	17,283	233 Jiwa/Km ²
Adonara Barat	79,71	7,315	7,294	14,609	62 Jiwa/Km ²
Wotan Ulumado	86,31	5,354	5,374	10,728	84 Jiwa/Km ²
Adonara Timur	91,06	15,604	16,554	32,158	483 Jiwa/Km ²
Klubagolit	44,41	6,352	6,999	13,351	423 Jiwa/Km ²
Witihama	79,43	8,860	9,656	18,516	170 Jiwa/Km ²
Ile Boleng	49,30	8,846	9,746	18,592	362 Jiwa/Km ²
Demon Pagong	85,40	2,598	2,610	5,208	67 Jiwa/Km ²
Lewolema	92,84	5,130	5,089	10,219	226 Jiwa/Km ²
Ile Bura	118,32	3,985	3,920	7,905	136 Jiwa/Km ²
Adonara	56,80	6,036	6,505	12,541	270 Jiwa/Km ²
Adonara Tengah	42,73	7,129	7,318	14,447	258 Jiwa/Km ²
Solor Selatan	31,58	3,510	3,726	7,236	95 Jiwa/Km ²
FLORES TIMUR	1.812,58	144,261	149,329	293,590	162 Jiwa/Km²

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 41,690 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 5,208 jiwa.

1.2.2.1 Penduduk Menurut Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	00-04	8,486	7,766	16,252	109.27
2	05-09	13,231	11,969	25,200	110.54
3	10-14	14,412	13,404	27,816	107.52
4	15-19	15,334	14,320	29,654	107.08
5	20-24	14,500	13,559	28,059	106.94
6	25-29	11,975	11,588	23,563	103.34
7	30-34	10,392	10,462	20,854	99.33
8	35-39	9,863	9,901	19,764	99.62
9	40-44	8,510	9,237	17,747	92.13
10	45-49	8,143	9,550	17,693	85.27
11	50-54	7,308	8,505	15,813	85.93
12	55-59	6,260	7,686	13,946	81.45
13	60-64	5,001	6,288	11,289	79.53
14	65-69	3,842	5,185	9,027	74.10
15	70-74	2,722	3,949	6,671	68.93
16	75+	4,282	5,960	10,242	71.85
Jumlah		144,261	149,329	293,590	96.61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) sangat mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Flores Timur tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin penduduk Flores Timur sebesar 96,61, artinya diantara 100 perempuan terdapat 96 sampai 97 laki-laki.

1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk melihat bagaimana keadaan TPAK di Kabupaten Flores Timur akan disajikan dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin 2021

Jenis Kegiatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	70811	63230	134041
a. Bekerja	68165	61642	129807
b. Pengangguran	2646	1588	4234
Bukan Angkatan Kerja	15555	37106	52661
a. Sekolah	7128	7213	14341
b. Mengurus Rumah Tangga	3043	25392	28435
c. Lain – lain	5384	4501	9885
Jumlah	86366	100336	186702

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2021

Dari tabel 1.4. di atas, dapat kita ketahui bahwa pada Tahun 2021 Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 134.041 orang sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 52.661 orang. Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total produk/nilai tambah semua sector ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam satu periode/tahun tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ialah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada satu tahun tertentu.

Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah (PDRB) yang telah dibentuk oleh setiap kegiatan ekonomi pada periode berjalan (berlaku). Disamping itu juga dapat diperoleh gambaran tentang peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam membentuk nilai tambah maupun rata-rata pendapatan penduduk pada periode berjalan. Tabel 1.5 berikut ini dapat kita lihat bagaimana perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2016 sampai dengan 2020

Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1134.15	1231.58	1337.14	1434.57	1447.88
Pertambangan dan Penggalan	39.11	41.28	44.05	47.19	47.23
Industri Pengolahan	35.77	38.52	40.97	44.26	44.14
Pengadaan Listrik dan Gas	3.13	3.44	3.89	3.93	4.42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.17	1.22	1.31	1.40	1.45
Konstruksi	198.39	214.05	231.84	251.52	225.50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	361.91	388.38	416.65	451.68	437.46
Transportasi dan Pergudangan	236.13	254.80	270.92	282.99	274.41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.05	4.35	4.65	4.80	4.05
Informasi dan Komunikasi	186.88	200.58	214.28	229.85	259.78
Jasa Keuangan dan Asuransi	160.49	178.98	187.85	198.16	217.04
Real Estate	144.29	154.75	164.22	162.89	161.17
Jasa Perusahaan	6.54	7.33	7.82	8.20	5.57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	657.65	737.94	829.72	896.88	959.19
Jasa Pendidikan	685.42	719.00	784.44	842.75	860.93

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98.56	105.62	114.88	122.87	135.77
Jasa lainnya	209.62	229.29	246.68	268.23	233.18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4163253	4163.25	4511.12	4901.29	5252.18

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2021

Dari Tabel 1.5 diatas terlihat bahwa sektor pertanian masih sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Flores Timur sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempunyai kontribusi yang paling kecil. Dii antara berbagai kegiatan lapangan usaha tersebut, Jasa Pendidikan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Begitu juga dengan sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meskipun peranannya berangsur-angsur menurun namun di tahun 2020 mulai naik.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Flores Timur didominasi oleh 3 (Tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Jasa Pendidikan, dan Administrasi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Flores Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Flores Timur pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan Usaha pertanian, yaitu mencapai 1447.88 milyar rupiah. Selanjutnya lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan 959.19 milyar rupiah, disusul lapangan Usaha jasa pendidikan sebesar 860.93 milyar rupiah.

Perbandingan PDRB Harga Konstan disuatu wilayah antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya merupakan perbandingan kuantum produk antara dua tahun tanpa dipengaruhi oleh harga (inflasi/deflasi) pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari suatu tahun ke tahun berikutnya adalah pertumbuhan riil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 1.6

PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Tahun 2015-2019

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	821.47	857.69	901.33	939.89	943.44
Pertambangan dan Penggalian	29.43	31.10	32.78	34.71	34.73
Industri Pengolahan	30.40	32.10	32.76	34.36	33.18
Pengadaan Listrik dan Gas	2.26	2.28	2.49	2.52	2.82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.89	0.91	0.96	1.00	1.03
Konstruksi	178.23	187.32	196.79	208.52	187.69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	244.20	255.05	267.40	281.04	264.80
Transportasi dan Pergudangan	170.89	178.88	186.55	192.58	187.23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.56	2.67	2.79	2.86	2.41
Informasi dan Komunikasi	164.69	173.48	184.65	195.42	222.84
Jasa Keuangan dan Asuransi	129.50	137.09	139.18	143.90	157.61
Real Estate	105.65	111.78	116.78	116.10	115.52
Jasa Perusahaan	4.20	4.45	4.51	4.69	3.09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	538.46	575.24	612.33	654.82	702.30
Jasa Pendidikan	416.59	417.38	428.65	449.30	448.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.88	72.37	75.75	78.91	82.69
Jasa lainnya	136.26	142.67	147.86	154.89	134.06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3045.56	3182.46	3333.58	3495.50	3524.13

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Flores Timur pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Flores Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,52 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut naik dari 3,49 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.87 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 2019 yang mencapai 4,81 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada tabel 1.7 dibawah ini :



Tabel 1.7

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2020

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.41	5.09	4.28	0.38
Pertambangan dan Penggalian	5.70	5.39	5.89	0.05
Industri Pengolahan	5.57	2.06	4.88	3.43
Pengadaan Listrik dan Gas	0.56	9.56	0.89	12.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.79	5.72	4.28	3.06
Konstruksi	5.10	5.06	5.96	9.99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.44	4.84	5.10	5.78
Transportasi dan Pergudangan	4.68	4.29	3.23	2.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.41	4.71	2.27	15.66
Informasi dan Komunikasi	5.34	6.44	5.83	14.03
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.86	1.53	3.39	9.53
Real Estate	5.80	4.48	(0.58)	0.50
Jasa Perusahaan	5.99	1.26	3.88	34.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.83	6.45	6.94	7.25
Jasa Pendidikan	0.19	2.70	4.82	0.13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.56	4.67	4.18	4.78
Jasa lainnya	4.70	3.64	4.75	13.45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.49	4.75	4.86	0.82

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2021

Pada tabel 1.7. menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,49 persen, naik menjadi 4,75 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0.82 persen.

Dengan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Flores Timur, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi sektor yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

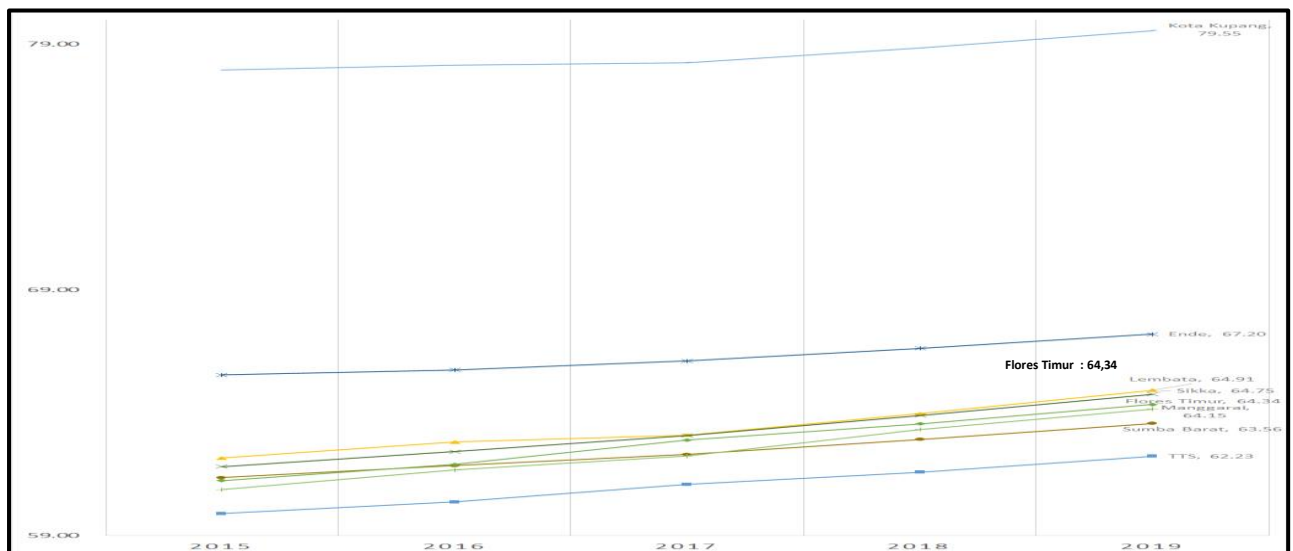
1.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sampai dengan tahun 2021, IPM Flores Timur mencapai 64.22. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65.28.

Gambar 1.2

Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2020

1.2.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:
 - a Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - c Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - e Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

- h Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- m Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- n Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- r Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
- s Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;

- t Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
- u Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:

- a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
- b Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
- d Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Kecamatan, terdiri dari:

- a Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
- b Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
- c Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
- d Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
- e Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
- f Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
- g Kecamatan Witihama dengan Tipe A;
- h Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
- i Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
- j Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
- k Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
- l Kecamatan Titehena dengan Tipe A;

- m Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
- n Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
- o Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
- p Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
- q Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
- r Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
- s Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Nominatif PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 keadaan 31 Desember 2021 sebanyak 4.717 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.088 orang dan perempuan sebanyak 2.626 orang. Pada Tabel 1.8 dan 1.9 digambarkan rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	SD	22	4	26
2	SLTP	38	5	43
3	SLTA	620	454	1.074
4	D.I	9	86	95
5	D.II	128	89	217
6	D.III	210	682	892
7	S.1	1.014	1.291	2.305
8	S.2	47	15	62
9	S.3	-	-	-
Jumlah		2.088	2.262	4.714

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Gol.I	26	6	32
2	Gol.II	464	495	959

3	Gol.III	1.164	1.822	2.986
4	Gol.IV	434	303	737
Jumlah		2.088	2.626	4.714

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan data Jabatan Struktural Tahun 2021, terdapat 858 Jabatan dengan 735 Jabatan terisi dan masih terdapat 123 jabatan yang lowong keadaan 31 Desember Tahun 2021 sesuai Tabel 1.10 di bawah ini :

Tabel 1.10 Data Jabatan Struktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1	JPT	36	35	1
2	Administrator	183	180	3
3	Pengawas	639	520	119
Jumlah		858	735	123

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2020

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.3.1 Permasalahan Terkait Program Prioritas

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;
 - c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
 - e. Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Tingginya angka DO;
 - h. Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;

- i. Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
 - j. Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
 - l. Angka stunting yang tergolong tinggi;
 - m. AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
 - n. Belum adanya lembaga perlindungan anak;
 - o. Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
 - p. Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.
2. Bidang Ekonomi
- a. Rendahnya pendapatan masyarakat;
 - b. Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
 - c. Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
 - d. Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
 - e. Pemetaan Kawasan;
 - f. Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
 - g. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan rama lingkungan;
 - h. Ketersediaan energi, protein, lemak;
 - i. Pola panganekaragaman pangan;
 - j. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - k. Regulasi terkait pengolahan sumber daya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
 - l. Perluasan pemasaran garam.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- a. Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
 - b. Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
 - c. Prasarana transportasi laut belum memadai;
 - d. Peralatan uji kir belum berfungsi;
 - e. Pendistribusian air PDAM kurang merata;
 - f. Menurunnya debit air pada sumber mata air;
 - g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
 - h. Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;

- i. Masih ada pertambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat;
- j. Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- k. Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
- l. Masih banyak beklag;
- m. Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
- n. Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;
- o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
- p. Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
- q. Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang,

4. Bidang Pemerintahan

- a. Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan publik;
- b. Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
- c. Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
- e. Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
- f. Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

1.3.2 Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

- 1. Kondisi geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam;
- 2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

1.3.3 Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini menampilkan sejumlah permasalahan adalah :

- 1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
- 2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
- 3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengkomulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik;
- 4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat;

5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI;
6. Di bidang olahraga prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

1.3.3 Permasalahan pada aspek pelayanan umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
3. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB;
6. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
7. Sistem dan prosedur kerja dilingkungan aparatur Negara belum efisiensi, efektif dan berprilaku hemat;
8. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
9. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal;
10. Belum optimalnya pelayanan persampahan, karena belum tersedianya TPS secara merata dalam kota dan TPK di luar kota;
11. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan;
12. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
13. Belum efektifnya lembaga penyelenggara Negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

1.3.5 Permasalahan pada aspek daya saing

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani;

2. Rendahnya pendapatan asli daerah;
3. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
5. Belum berkembangnya investasi di daerah;
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

1.3.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2020, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian;
2. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut yang bersinergi dengan pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan biota/ mamalia laut;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;
5. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
6. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
7. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan belum memadai;
8. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum memadai;
9. Masih tingginya pertumbuhan penduduk;
10. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
11. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

13. Ketersediaan air baku;
14. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
15. Lingkungan hidup;
16. Pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah, Kondisi Pemerintahan, Jumlah Pegawai Negeri Sipil. Bab I juga berisi Permasalahan Utama (*strategis issue*) serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Daerah yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja Utama dalam Ringkasan RPJMD Tahun 2017-2022 serta Agenda Pembangunan Daerah, juga disajikan Program dan Pencapaian Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur, juga disajikan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta capaian kinerja keuangan daerah dengan menyajikan realisasi anggaran per bidang urusan.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2017- 2022

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali

- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan



5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Langkah-langkah percepatan melalui misi selamatkan orang muda, selamatkan infrastruktur, selamatkan tanaman rakyat, selamatkan laut Flores Timur dan reformasi birokrasi serta didukung dengan tiga kebijakan strategis yakni :

1. Kebijakan pembangunan pendidikan,
2. Kebijakan pembangunan pariwisata, dan
3. Kebijakan pembangunan kesehatan diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran RPJPD pada lima tahun ketiga.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara



keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 pada masing-masing visi dan misi sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah ekonomi

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kemandirian orang muda;

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah wirausahawan baru.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.

Indikator Kinerja :

- a. Tingkat Pengangguran terbuka.

Tujuan 2 : Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya

Sasaran :

- 1) Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah konflik sosial antar pemuda.

- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

Indikator Kinerja :

- a. Rata-rata lama sekolah

- b. Angka partisipasi murni :

- Persentase PAUD
- Persentase Sekolah Dasar (SD)
- Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- c. Angka Partisipasi Kasar :

- Persentase PAUD
- Persentase Sekolah Dasar (SD)
- Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- d. Angka Melek Huruf

- e. Angka Buta Huruf

- f. Angka Melanjutkan Pendidikan :

- Ke SD
 - Ke SMP
 - g. Angka kelulusan (AL)
 - SD/MI
 - SMP/MTs
 - h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1
 - i. Persentase sarana prasarana pendidikan (SD, SMP kondisi baik)
 - SD
 - SMP
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat :
- Indikator Kinerja :
- a. Usia Harapan Hidup
 - b. Angka kematian bayi
 - c. Angka kematian ibu
 - d. Angka gizi buruk
 - e. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar
 - f. Cakupan pelayanan usia produktif
 - g. Cakupan penanganan kasus penyakit menular
 - h. Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular
 - i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
 - j. Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+
 - k. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
 - l. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
 - m. Cakupan peserta KB aktif
 - n. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin
- 4) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja :



- a. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
- 5) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Indikator Kinerja :

- a. Partisipasi perempuan pada jabatan publik
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan
- c. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak

Tujuan 3 : Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kinerja transportasi

Indikator Kinerja :

- a. Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik
- b. Persentase angkutan umum laik jalan
- c. Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan
- d. Rasio izin trayek

- 2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

Indikator Kinerja :

- a. Rasio jaringan irigasi
- b. Akses air minum aman
- c. Daerah mata air yang dikonservasi

Tujuan 4 : Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana

Sasaran :

- 1) Mengurangi resiko akibat bencana

Indikator Kinerja :

- a. Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun.

- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja :

- a. Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan
- b. Rehabilitasi lahan kritis

Tujuan 5 : Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Sasaran :

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman

Indikator Kinerja :

- a. Rumah tidak layak huni
- b. Akses limbah domestik sanitasi layak
- c. Akses air minum aman
- d. Persentase sampah perkotaan yang ditangani

Tujuan 6 : Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan
Sasaran :

- 1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah dokumen perencanaan
- b. Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang
- c. Pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan

Tujuan 7 : Meningkatnya produksi tanaman rakyat

Sasaran :

- 1) Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

Indikator Kinerja :

- a. Tanaman Perkebunan :
 - Jambu Mente
 - Tembakau
 - Kelapa
- b. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk
 - tanaman pangan
 - Tanaman hortikultura
 - Taman Perkebunan
- c. Ketersediaan Pangan
 - Energi (kkl/kap/hr)
 - Protein (gr/kap/hr)
 - Lemak (gr/kap/hr)
- d. Persentase Konsumsi Pangan (PPH)

Tujuan 8 : Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat

Sasaran :

- 1) Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;

Indikator Kinerja :

- a. Penguatan system pemasaran.

Tujuan 9 : Terselamatkannya Ekosistem Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut;

Indikator Kinerja :

- a. Penanganan ilegal fishing
- b. Penanganan destruktif e fishing
- c. Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)

Tujuan 10 : Terpeliharanya Potensi Laut

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator Kinerja :

- a. Peningkatan produksi perikanan tangkap
- b. Peningkatan produksi perikanan budidaya
- c. Luas area garam (Ha)
- d. Jumlah produksi garam (Ton/tahun)
- e. Jumlah kelompok budidaya perikanan.

Tujuan 11 : Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan
- b. Jumlah OPD yang memiliki SOP
- c. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk
- d. Rasio pasangan berakte nikah
- e. Rasio penduduk berakte kelahiran
- f. Jumlah izin yang dilayani tiap tahun
- g. Pola pengembangan karier ASN daerah
- h. Ketersediaan Dokumen Perencanaan
- i. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

- j. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda
 - k. Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
 - l. OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi
 - m. Persentase desa sadar hukum dan komunitas
 - n. Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat
 - o. Cakupan pelayanan korban bencana
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif
- a. Desa sangat tertinggal
 - b. Desa tertinggal
 - c. Desa berkembang
 - d. Desa maju
 - e. Desa mandiri

Tabel 2.1

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Selamatkan Orang Muda Flores Timur	1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	a. Meningkatkan kemandirian orang muda b. Meningkatkan kesempatan kerja	1) Jumlah wirausahawan baru 2) Tingkat pengangguran terbuka
	2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	a. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial antar pemuda
		b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1) Rata-rata lama sekolah 2) Angka partisipasi murni - Persentase PAUD - Persentase SD - Persentase SMP 3) Angka partisipasi kasar - Persentase PAUD - Persentase SD - Persentase SMP 4) Angka melek huruf 5) Angka buta huruf 6) Angka melanjutkan pendidikan - Ke SD - Ke SMP 7) Angka kelulusan (AL) - SD /MI - SMP /MTs 8) Guru yang memenuhi kelulusan S1 9) Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik - SD - SMP

1	2	3	4
		c. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat	1) Usia Harapan Hidup 2) Angka kematian bayi 3) Angka kematian ibu 4) Angka gizi buruk 5) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 6) Cakupan pelayanan usia produktif 7) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 8) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 9) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 10) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+ 11) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 12) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 13) Cakupan peserta KB aktif 14) Cakupan pelayanan KB Keluarga Miskin
		d. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
		e. Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1) Partisipasi perempuan pada jabatan politik 2) Partisipasi angkatan kerja perempuan 3) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	3. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	a. Meningkatnya kinerja transportasi	1) Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik 2) Pengujian angkutan umum laik jalan 3) Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 4) Rasio izin trayek

1	2	3	4
		b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1) Rasio jaringan irigasi 2) Akses air minum aman Persentase daerah mata air yang dikonservasi
	4. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	a. Mengurangi resiko akibat bencana b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun 1) Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 2) Persentase rehabilitasi lahan kritis
	5. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1) Persentase rumah tidak layak huni 2) Akses limbah domestik sanitasi layak 3) Akses air minum aman 4) Persentase sampah perkotaan yang ditangani
	6. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1) Jumlah dokumen perencanaan 2) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 3) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
	7. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	1) Tanaman Perkebunan ➤ Jambu Mente ➤ Tembakau ➤ Kelapa 2) Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan untuk tanaman: ➤ Pangan ➤ Hortikultura ➤ Perkebunan : 3) Ketersediaan pangan ➤ Energi ➤ Protein ➤ Lemak 4) Persentase Konsumsi Pangan (PPH).
	8. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	Penguatan sistem pemasaran

1	2	3	4
Selamatkan Laut Flores Timur	9. Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Penanganan <i>illegal fishing</i> 2) Penanganan <i>destruktif e-fishing</i> 3) Persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)
	10. Terpeliharanya Potensi Laut	Meningkatnya produksi perikanan	1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya 3) Luas area garam (Ha) 4) Jumlah produksi garam (ton/tahun) 5) Jumlah kelompok budidaya perikanan
Reformasi Birokrasi	11. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 2) Jumlah OPD yang memiliki SOP 3) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 4) Rasio pasangan berakta nikah 5) Rasio penduduk berakte kelahiran 6) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 7) Pola pengembangan karier ASN daerah 8) Ketersediaan Dokumen Perencanaan 9) Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan Perda; 10) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda 11) Penilaian terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah 12) OPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi 13) Desa sadar hukum dan Komunitas 14) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 15) Cakupan pelayanan korban bencana

1	2	3	4
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	1) Desa sangat tertinggal 2) Desa tertinggal 3) Desa berkembang 4) Desa maju 5) Desa mandiri

2.2.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta acuan bagi *stakeholders* terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit ***Desa Membangun Kota Menata***.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dari masing-masing strategi dirumuskan program prioritas disertai pagu indikatif. Selain itu sebagai upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan pula kebijakan strategis pembangunan yang dilaksanakan melalui spirit *Desa Membangun Kota Menata*. Kebijakan strategis tersebut adalah:

1. Kebijakan Pembangunan Pendidikan
2. Kebijakan Pembangunan Pariwisata
3. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, membangun prasarana dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honor, peningkatan kemampuan guru dan pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa asal Flores Timur yang kuliah di perguruan tinggi yang ada di Flores Timur.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa desa wisata dan kawasan wisata.

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk penempatan tenaga kesehatan yang memadai untuk setiap desa (gizi, bidan dan perawat), peningkatan fungsi Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, dan peningkatan kapasitas pelayanan RSUD.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
1. Terselamatnya Orang Muda dari masalah Ekonomi	1. Meningkatnya kemandirian orang muda 2. Meningkatkan kesempatan kerja	1) Jumlah wirausahawan baru 2) Tingkat pengangguran terbuka
2. Terselamatkannya Orang Muda dari masalah sosial budaya	3. Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda

1	2	3
	4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata –Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD / MI 16) Angka kelulusan (AL) SMP / MTs 17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	22) Usia Harapan Hidup 23) Angka Kematian Bayi 24) Angka kematian ibu 25) Angka gizi buruk 26) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 27) Cakupan pelayanan usia produktif 28) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 29) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 30) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 31) Penemuan penderita baru penyakit TB – BT+ 32) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD 33) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 34) Cakupan peserta KB aktif 35) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin
	6. Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	36) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
	7. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	37) Partisipasi perempuan pada jabatan publik 38) Partisipasi angkatan kerja perempuan 39) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak

1	2	3
Misi 2 Selamatkan Infrastruktur		
1. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatnya kinerja transportasi	1) Prasarana transportasi dalam kondisi baik 2) Pengujian angkutan umum laik jalan 3) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 4) Rasio izin trayek
	2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	5) Rasio jaringan irigasi 6) Akses air minum aman 7) Presentase Daerah mata air yang dikonservasi
2. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	3. Mengurangi resiko akibat bencana	8) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9) Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 10) Presentase rehabilitasi lahan kritis
3. Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	11) Persentase rumah tidak layak huni 12) Akses limbah domestik sanitasi layak 13) Akses air minum aman 14) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani
4. Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	6. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	15) Jumlah dokumen perencanaan 16) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 17) Persentase pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan
Misi 3 Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur		
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	1) Tanaman perkebunan jambu mente 2) Tanaman perkebunan Tembakau 3) Tanaman perkebunan Kelapa 4) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan 5) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Tanaman hortikultura 6) Luas Lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Tanaman perkebunan 7) Ketersediaan pangan energi 8) Ketersediaan Pangan Protein 9) Ketersediaan Pangan Lemak 10) Persentasi Konsumsi Pangan
2. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat	2. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	11) Persentase penguatan sistem pemasaran

1	2	3
Misi 4 Selamatkan Laut Rakyat Flores Timur		
1. Terselamatkannya Ekosistem Laut	1. Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Presentase Penanganan <i>illegal fishing</i> 2) Presentase Penanganan <i>destructive fishing</i> 3) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)
2. Terpeliharanya Potensi Laut	2. Meningkatnya produksi perikanan	3) Presentase Peningkatan produksi perikanan tangkap 4) Presentase Peningkatan produksi perikanan budidaya 5) Luas area garam (Ha) 6) Jumlah produksi garam (ton/tahun) 7) Jumlah kelompok budidaya perikanan
Misi 5 Reformasi Birokrasi		
1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	1) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 2) Jumlah OPD yang memiliki SOP 3) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 4) Rasio pasangan berakta nikah 5) Rasio penduduk berakte kelahiran 6) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 7) Pola pengembangan karier ASN daerah 8) Ketersediaan dokumen perencanaan 9) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda 10) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda 11) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah 12) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi 13) Desa Sadar Hukum dan Komunitas 14) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat 15) Cakupan pelayanan korban bencana
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	16) Desa sangat tertinggal 17) Desa tertinggal 18) Desa berkembang 19) Desa maju 20) Desa mandiri

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 ada pada Lampiran.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perubahan / Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	55
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,15
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	0
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD / MI 16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs 17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1 18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik 19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	Tahun % % % % % % % % % % % % % % % %	7,34 48 91,02 71,62 46 105 99 99,85 1 100 97,59 99,99 98,8 100 60,24 70,02
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup 21) Angka Kematian Bayi 22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH) 23) Angka gizi buruk 24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 25) Cakupan pelayanan usia produktif 26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 29) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+	Tahun % % % % % % % % % % %	66,9 17/1000 110/100.000 0,3 100 90 88 50 100 95

		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
		31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	75
		32) Cakupan peserta KB aktif	%	65
		33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	89
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan social	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,70
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik 36) Partisipasi angkatan kerja perempuan 37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	% % %	45,50 65 20
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik 39) Pengujian Angkutan umum laik jalan 40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan 41) Rasio izin trayek	Unit Kali Unit Dok	1 609 15 91
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi 43) Akses air minum aman 44) Presentase Daerah mata air yang dikonservasi	% % lokasi	0,41 100 3
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan 47) Presentase Rehabilitasi lahan kritis	Jenis Ha	154 0
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni 49) Akses limbah domestik sanitasi layak 50) Akses air minum aman 51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	Unit unit SR %	195 580 1768 100
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan 53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang 54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Dok % Lokasi	2 100 2

14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	55) Tanaman perkebunan Jambu Mente	Ton	2687
		56) Tanaman perkebunan Tembakau	Kg	0
		57) Tanaman perkebunan Kelapa	Kg	4687
		58) Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan	Ha	220
		59) Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura	Ha	30
		60) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	300
		61) Ketersediaan pangan energi	Kkap	3,243
		62) Ketersediaan Pangan Protein	Gr	85,41
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	63) Ketersediaan Pangan Lemak	Gr	65,64
		64) Persentasi Konsumsi Pangan	%	80,6
		65) Penguatan sistem pemasaran	kecamata n	1
16.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	66) Presentase Penanganan <i>illegal fishing</i>	Kasus	9
		67) Presentase Penanganan <i>destruktive fishing</i>	Kasus	1
		68) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota Laut)	Jenis	10
17.	Meningkatnya produksi perikanan	69) Presentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15.578
		70) Presentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	304,6
		71) Luas area garam	Ha	2,5
		72) Jumlah produksi garam	Ton	100
			kelompok	45
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	74) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7
		75) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	3
		76) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	90
		77) Rasio pasangan berakta nikah	%	22
		78) Rasio penduduk berakta kelahiran	%	54
		79) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2400
		80) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	206
		81) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	Ada
		82) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada
		83) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDP yang telah di tetapkan dengan Perda	Dok	Ada
		84) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP
		85) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	30
		86) Desa sadar hukum dan komunitas	%	100
		87) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	5
		88) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100

19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	89) Desa sangat tertinggal	%	0
		90) Desa tertinggal	%	10,48
		91) Desa berkembang	%	72,49
		92) Desa maju	%	15,72
		93) Desa mandiri	%	1,31

TABEL 2.4

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Orang Muda			
1.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	260.421.000,-	APBD II
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	28.665.500,-	APBD II
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	51.730.000,-	APBD
2.	Program Hubungan Industrial	18.147.100,-	APBD
3.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.920.000,-	APBD
Sasaran 3 : Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan			
1.	Program perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial <i>Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah aktual</i>	90.051.500,-	APBD
2.	Program perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial <i>kegiatan Fasilitasi tim terpadu penanganan Konflik Sosial</i>	56.550.000,-	APBD
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	49.143.618.851,-	APBD
2.	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	209.055.000,-	APBD
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.853.212.591,-	APBD
Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.038.918.100,-	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	233.902.300,-	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	264.836.300,-	APBD
Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak			
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	48.740.000,-	APBD

2.	Program Perlindungan Perempuan	0	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	18.941.700,-	APBD
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	29.938.600,-	APBD
Sasaran 8 : Meningkatnya Kinerja Transportasi			
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	524.877.216,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	67.395.500,-	APBD
Sasaran 9 : Meningkatnya Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	557.876.700,-	DAU
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.914.388.115,-	DAU
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	116.270.630,-	DAU
Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	557.876.700,-	APBD
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	22.923.300,-	DAU
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	116.270.630,-	DAU
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	80.245.000,-	DAU
Sasaran 12 : Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman			
1.	Program Kawasan Permukiman	10.104.414.547,-	APBD
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah B3	21.590.000,-	DAU
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.914.388.115,-	APBD
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	176.745.300,-	DAU
5.	Program Pengelolaan Persampahan	1.015.638.270,-	DAU
Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota			
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.080.643.900,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan penataan ruang	100.564.800,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	250.423.900,-	DAU
Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal			
1.	Program pengembangan prasarana Pertanian	479.257.300,-	APBD
2.	Program Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	41.714.000,-	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	315.687.050,-	APBD

4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	57,638.000,-	APBD
Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah			
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	18.450.000,-	APBD
Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut			
1.	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	54.955.000,-	DAU
2.	Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	27.285.000,-	DAU
3.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	27.526.300,-	DAU
Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan			
1.	Program Perikanan Tangkap	2.893.065.366,-	DAU
2.	Program Pengembangan Budidaya perikanan	20.155.000,-	DAU
3.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	30.925.000,-	DAU
Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Progra Fasilitasi Pelayanan Public dan Tata Laksana	131.648.671,-	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	704.283.601,-	Dak Non Fisik
3.	Program Pencatatan Sipil	461.945.675,-	Dak Non Fisik
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.910.126,-	APBD II,
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	86.979.700,-	APBD
6.	Program Kepegawaian Daerah	1.488.168.783,-	APBD
7.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.080.643.900,-	APBD
8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	275.425.308.264,-	APBD
9.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	304.215.057,-	APBD
10.	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.735.000,-	APBD
11.	Program Penanggulangan Bencana	15.148.837.600,-	APBD
Sasaran 19 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif			
1.	Program Penataan Desa	32.360.000,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	699.812.400,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	386.709.800,-	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Flores Timur Tahun 2020

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam RPJMD terdapat 5 Misi, 11 Tujuan, 19 Sasaran, dengan 91 Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

Realisasi – (Realisasi – Rencana)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga terdapat 19 sasaran dengan indikator kinerja yang semula berjumlah 111 indikator kinerja sasaran menjadi 93 indikator kinerja sasaran sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 37 indikator kinerja
 - Misi 2 terdapat 4 tujuan, 6 sasaran dan 21 indikator kinerja
 - Misi 3 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 11 indikator kinerja
 - Misi 4 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator kinerja
 - Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 20 indikator kinerja
- (19 Sasaran Strategis dan 93 Indikator Kinerja Utama)

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					BS	B	C	K
1	Misi 1	2	7	37	2	2	1	2
2	Misi 2	4	6	17	-	4	2	-
3	Misi 3	2	2	11	-	1	1	-
4	Misi 4	2	2	8	-	2	-	1
5	Misi 5	1	2	20	1	1	-	-
Jumlah		11	19	93	3	10	4	3

Dari 19 (Sembilan belas) sasaran dengan 93 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah :

Tabel 3.3

Presentasi Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi 1 (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	28,57
2	Baik (B)	2	28,57
3	Cukup (C)	1	14,28
4	Kurang (K)	2	28,57
Jumlah		7	100
Misi 2 (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	4	66,66
3	Cukup (C)	2	33,33
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		6	100
Misi 3 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	1	50
3	Cukup (C)	1	50
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		2	100
Misi 4 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	2	100

3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	50
Jumlah		3	150
Misi 5 (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	1	50
2	Baik (B)	1	50
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
Jumlah		2	100
Rata-Rata Capaian Misi 1-5		19	89,28

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 93 indikator sasaran, diketahui bahwa 3 indikator sasaran kategori Baik Sekali atau 15,78%, indikator sasaran kategori Baik 10 atau 52,60 % , 4 indikator sasaran dengan kategori Cukup atau 21,04% dan 3 indikator sasaran kategori Kurang atau 15,78%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **89,28 %** dengan kategori **Baik** . Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 **Baik**.

3.2 Analisis Capaian

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1: Selamatkan Orang Muda Flores Timur

Diukur melalui 7 sasaran dengan 37 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kemandirian Orang Muda

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah wirausahawan baru	UMKM	168	6	4	55	29	52,73
Rata-rata capaian kinerja								

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Orang Muda**, 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 52,73% dengan kategori **kurang**.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target dimaksud :

1. Sumber daya manusia;

Aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Skill/ keterampilan di bidang usaha maupun di bidang teknologi atau pun keterampilan lainnya yang dibutuhkan di dunia kerja;
2. Membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membuka industri-industri yang berskala kecil yang mudah menyerap tenaga kerja;

3. Melaksanakan sosialisasi undang-undang ketenaga kerjaan bagi masyarakat;
4. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk (i) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, (ii) memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
6. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
7. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi, (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Tabel 3.5

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	260.440.000	260.421.000,-	99,99
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	28.708.500,-	28.665.500,-	98,85
Rata-rata		289.148.500,-	289.086.500,-	99,97

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kemandirian Orang Muda adalah Rp. 289.086.500,- dari target Rp. 289.148.500,- atau sebesar 99,97%.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kesempatan Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,68	3,09	115,00	2,06	3,15	152,91
Rata-rata capaian kinerja				115,00			152,91

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesempatan Kerja**, 1 Indikator Sasaran mencapai target, rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sebesar **152,91%**, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 115 %, sehingga masuk pada kategori **baik sekali**.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu masalah Belum Optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial. Tidak seimbangnya rasio dari jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan dan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota belum optimal. Maka solusinya adalah dengan meningkatkan pembinaan yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial, meningkatkan MoU dengan perusahaan dan stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan, memperluas jaringan informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, adanya sistem pembekalan akhir sebelum pemberangkatan sehingga mengurangi masalah TKI.

Tabel 3.7

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	51.780.500	51.730.000	99,9
2	Program hubungan industrial	18.287.100	18.147.100	99,23
3	Program pembangunan kawasan transmigrasi	15.941.400	15.920.000	99,865
Rata-rata		86.009.000	85.797.100	99,75

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah Rp. **85.797.100,-** dari target Rp. **86.009.000,-** atau sebesar **99,75%**.

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Jumlah konflik antar pemuda	Kasus	10	10	100	0	0	100
Rata-rata capaian kinerja				100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**, 1 Indikator Sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai Realisasi Tahun 2021 tersebut diperoleh dari kegiatan fasilitasi penanganan masalah aktual atas kerjasama dari Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah teknis dan Aparat Keamanan (TNI-POLIRI), serta peran seluruh stakeholder khususnya tokoh kunci dan lembaga kemitraan.

Adapun kendala yang dihadapi adalah hampir semua kegiatan membutuhkan koordinasi yang luas karena melibatkan berbagai komponen sumberdaya manusia dan kelembagaan sehingga sangat riskan terhadap penjadwalan kegiatan dan pendanaan secara tepat. Sehingga perlunya peningkatan pemantapan koordinasi tentang kebijakan, program dan kegiatan dengan keterlibatan Stakeholder.

Tabel 3.9

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 3

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial <i>Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Aktual</i>	90.051.500	90.051.500	100

2	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial <i>Kegiatan Fasilitasi Tim terpadu penanganan konflik social</i>	56.550.000	56.550.000	100
Rata-rata		146.601.500	146.601.500	100

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Karakter Orang Muda Wawasan Kebangsaan adalah Rp. **146.601.500,-** dari target Rp. **146.601.500,-** atau sebesar 100%.

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,27	7,27	100	7,34	7,30	99,46
2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	48	54,64	113,83	48	67,54	140,71
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	91,02	81,94	90,02	91,02	88,47	97,20
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	71,62	55,83	77,95	71,62	69,9	97,60
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	57,02	123,96	46	89,63	194,85
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	105	94,29	89,80	105	101,57	96,73
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	99	78,34	79,13	99	94,64	95,69
8	Angka Melek Huruf	%	98,88	98,81	99,93	99,85	99,52	99,97
9	Penurunan Angka Buta Huruf	%	1	2,89	289	1	2,89	289
10	Angka melanjutkan pendidikan ke SD	%	100	100	100	100	100	100
11	Angka melanjutkan pendidikan ke SMP	%	97,59	97,59	100	97,59	110,26	113
12	Angka kelulusan SD/MI	%	99,99	100	100,01	99,99	100	100,01
13	Angka kelulusan SMP/MTs	%	98,07	100	101,97	98,8	100	100,21
14	Guru yang memenuhi kelulusan S1	%	95	83,86	88,27	100	81,05	81,05
15	Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	59,01	60,24	102,08	60,24	22,95	38,10
16	Persentase sarana prasarana pendidikan SMP kondisi baik	%	20,95	70,02	334,22	70,02	26,94	38,47
Rata-rata					124,38			111,3781

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 16 indikator sasaran **Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan**, 16 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sebesar 111,3781 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 124,38 %, dan termasuk kategori **baik sekali**. Nilai realisasi capaian ini diperoleh dari :

1. Nilai Realisasi rata-rata Lama APK serta APM PAUD mencapai target **Baik Sekali** dikarenakan adanya upaya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dalam mendorong ketersediaan layanan pendidikan yang makin luas khususnya pada pendidikan anak usia dini. Sehingga dapat dilihat bahwa untuk kualitas layanan pendidikan anak usia dini untuk APK dengan realisasi target sebesar 89,63%. Capaian tahun ini naik 32,61% jika dibandingkan dengan dengan tahun 2020 yaitu 123,96%. Capaian ini semakin besar tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah untuk bersekolah pada jenjang Paud. Sedangkan untuk APM dengan Realisasi target sebesar 67,54% dan capaian tahun ini sebesar 194,85%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah Paud (5-6 Tahun) yang belum bersekolah sehingga pemerintah perlu melakukan pendampingan/Sosialisasi terhadap pentingnya program pendidikan anak usia dini bagi masyarakat.
2. Persentase penurunan angka buta huruf melebihi target disebabkan karena :
 - Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat memperhatikan kualitas pendidikan non formal merupakan salah satu sasaran strategis untuk meningkatkan angka melek huruf yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
 - Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 angka melek huruf adalah 98,81 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 angka melek huruf 95,92 hal ini menunjukkan ada peningkatan melek huruf atau ada penurunan angka buta huruf sebanyak 2,89% dari target 1 %.
3. Nilai Realisasi rata-rata Lama APK serta APM SD dan SMP mencapai target **Baik**, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa APK tingkat SD Realisasi 101,57% dari target 105% hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah pada jenjang SD belum cukup umur atau yang melebihi yang seharusnya untuk APM dari table terlihat bahwa realisasi 88,47% dari target 91,02% menunjukkan bahwa seluruh anak usia sekolah jenjang SD belum bersekolah tepat waktu. Sedangkan APK tingkat SMP realisasi 88,47% dari target 99%. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi penduduk untuk bersekolah pada jenjang SMP.

Realisasi APM tingkat SMP 69,9% dari target 77,62% menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia sekolah SMP bersekolah tepat waktu.

4. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai target **Baik Sekali** Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang mampu menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang tertentu, indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dinyatakan dalam presentase. Makin tinggi nilai nya makin baik hasil presentasinya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa untuk jenjang SD realisasi angka kelulusan sebesar 100% dari target 99,99% dengan capaian target 2021 100,01. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tahun pelajaran 2020/2021 tidak ada siswa yang dinyatakan tidak lulus. Sama halnya pada jenjang SMP realisasi angka kelulusan sebesar 100% dari target 98,80% dengan target capaian 2021 yaitu 101,21%.
5. Angka melanjutkan Pendidikan, nilai realisasi mencapai target karena untuk jenjang SD realisasi mencapai target karena siswa yang ada di TK/PAUD lanjut ke jenjang pendidikan SD, sedangkan untuk SMP dan SMA menunjukkan bahwa adanya siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA di luar Kabupaten Flores Timur. Sehingga solusinya Pemerintah menerapkan program beasiswa atau bantuan siswa miskin.
6. Angka pendidikan yang ditamatkan
 - Untuk jenjang SD realisasi mencapai target karena semua siswa SD menamatkan pendidikannya 100%.
 - Untuk jenjang pendidikan SMP mencapai target karena semua siswa SMP menamatkan pendidikannya 100%.
7. Presentase sarana dan prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik, dengan kategori **Kurang**.
 - Realisasi sekolah SD/MI dengan kondisi bangunan dalam keadaan baik di Kabupaten Flores Timur dengan realisasi kegiatan sebesar 22,95% dari target 60,24% sehingga capaian kinerja di tahun 2021 yaitu 38,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan baik sekolah SD/MI tahun 2021 belum mencapai target, hal ini disebabkan masih banyaknya kondisi bangunan ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan, sedangkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di alokasikan untuk rehabilitasi Ruang Kelas dengan kondisi Sedang/ Berat.

- Realisasi sekolah SMP/MTs dengan kondisi bangunan dalam keadaan baik di Kabupaten Flores Timur dengan realisasi kegiatan sebesar 26,94% dari target 70,02% sehingga capaian kinerja di tahun 2021 yaitu 38,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan baik sekolah SD/MI tahun 2021 belum mencapai target, hal ini disebabkan masih banyaknya kondisi bangunan ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan, sedangkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di alokasikan untuk rehabilitasi Ruang Kelas dengan kondisi Sedang/ Berat.
8. Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1 termaksud dalam kategori **Baik** dengan dengan realisasi kinerja sebesar 81,05% dari target 100% sehingga capaian kinerja di tahun 2021 yaitu 81,05 sehingga dapat dilihat bahwa presentase jumlah di kabupaten Flores Timur (SD,SMP) yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV realisasi melebihi di pengaruhi oleh kurangnya perguruan tinggi yang ada di kabupaten Flores Timur sehingga usaha tenaga pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi mendapat kendala yang cukup berat khususnya untuk biaya pendidikan tersebut.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung penyusunan program dan kegiatan serta pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2020
3. Terlambatnya penetapan petunjuk teknis penggunaan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah – sekolah penerima manfaat.
4. Terlambatnya proses pengadaan barang / jasa yang bersumber dari DAK untuk pengadaan peralatan pembelajaran dan peralatan pendidikan lainnya karena keterlambatan penetapan barang maupun penyedia pada sistem tersebut.
5. Penyelesaian sejumlah paket pekerjaan tidak tepat waktu.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS baik Satdik Negeri dan Swasta belum tertib dan tepat waktu
7. Terbatasnya sarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
8. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur SKPD dinas PKO (aspek jumlah, pendidikan, disiplin dan kinerja).
9. Pengendalian dan pengawasan internal SKPD belum maksimal.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengalokasian anggaran dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi [pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan pelaksanaan program/kegiatan sesuai kalender kerja tahunan yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya koordinasi yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran dalam rangka perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS.
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara intern.
6. Menegakan integritas nilai etika dan praktik pembinaan sumber daya manusia melalui penyusunan dan penyerapan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, serta tindak disiplin yang tepat.

Tabel 3.11

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program pengelolaan pendidikan	49.143.618.851	47.546.650.305	97
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	209.055.000	121.104.000	58
Rata-rata		49.352.673.851	47.667.754.305	97

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan adalah Rp. 47.667.754.305,- dari target Rp. 49.352.673.851,- atau sebesar 97%.

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Drajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,70	65,20	97,75	66,9	65,7	98,20
2	Angka Kematian Bayi	%	18/1000 KLH	9,8/1000 KLH	145	17/1000	11,1/1000	153,15

3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	120/ 100.000 KLH	121,59/ 100.000 KLH	98,67	110/100 .000	1449/10 0.000	73,83
4	Angka Gizi Buruk	%	0,3	0,1	166,67	0,3	0,4	75,00
5	Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	100	0	0	100	35	35
6	Cakupan Pelayanan Usia Produktif	%	70	43	61,43	90	34,6	38,44
7	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	Kasus	1.077	275	25,53	88	74	84
8	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	Kasus	40.251	9.317	23,15	50	54	108
9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	%	100	99,4	99,40	100	99,4	99,40
10	Penemuan Penderita Baru Penyakit TB – BTA+	%	90	19,9	22,11	95	19	20
11	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	75	58	77,33
13	Cakupan Peserta KB Aktif	%	68	52	76,47	65	31,2	48,00
14	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	%	88	88	100	89	76	83,39
Rata-rata					79,72			78,12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 14 indikator sasaran **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**, ada 7 indikator yang mendukung sasaran sudah mencapai target, dan 7 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 78,12 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 79,72 %, dengan kategori **Baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Usia Harapan Hidup dengan capaian realisasi 65,7 Tahun dimana masih belum mencapai target 66,9 Tahun.
2. Semakin kecil Angka Kematian Bayi, maka dapat dikatakan capaian kinerja semakin tinggi atau berhasil. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pencapaian dibawah target yang ditetapkan yaitu 11,1/1.000 KLH dari 17/1.000 KLH dengan jumlah kematian bayi 45 orang dari 4.022 KLH. Indikator-indikator pendukung yang mempengaruhi pencapaian target AKB ini seperti cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani sebesar 100%, cakupan kunjungan neonatal 100%, dan cakupan kunjungan bayi hanya 61,3%. Walaupun melebihi dari target yang ditetapkan namun jumlah kematian bayi masih cukup tinggi sehingga perlu berbagai upaya seperti melakukan pemeriksaan bayi/Neonatus yang lebih berkualitas pada saat kunjungan Neonatal dan kunjungan bayi .

3. Angka Kematian Ibu (AKI), hasil yang diperoleh dalam tahun 2021, belum tercapai dimana capaian angka kematian ibu yaitu 149/100.000 KLH dari target 110/100.000 KLH dengan jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang. Penyebab kematian ibu masih saja terjadi dapat dilihat dari indikator-indikator yang mendukung pencapaian AKI seperti pelaksanaan ANC yang terlihat dari indikator cakupan kunjungan ibu hamil (K4) yang tidak semua dilakukan dengan pencapaian 83,9% dari target. Dari 4.093 ibu hamil yang ada di Kabupaten Flores Timur hanya 3.433 ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 ke Fasilitas Kesehatan.
4. Pada Kasus Gizi Buruk untuk tahun 2021 penemuan kasus sebanyak 71 balita atau 0,4% dari 17.661 balita yang ditimbang. Capaian ini masih di bawah target yang di tetapkan yaitu 0,3%. Indikator gizi lainnya seperti Prevalensi stunting capaian melebihi target yaitu 20,9% dari target 30% dengan jumlah balita stunting sebanyak 3.691.
5. Cakupan penanganan penyakit menular seperti penemuan penderita baru TB BTA (+) pencapaiannya masih jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu 19% dari target 95% dengan jumlah kasus yang ditemukan 175 Kasus dari perkiraan 907 Kasus. Semua Kasus yang ditemukan diobati 100%. Walaupun demikian, pada indikator angka keberhasilan pengobatan penderita baru TB BTA (+) baru mencapai 62,5% dengan kesembuhan 20,6%. Sedangkan sisa penderita masih dalam proses pengobatan. Untuk penyakit kasus menular lainnya seperti pada indikator DBD yang ditangani capaiannya 100% dimana semua kasus DBD yang ditemukan semuanya ditangani.
6. Cakupan penyakit tidak menular seperti pada indikator prevelensi tekanan darah tinggi capaian 18,7% dari target 18%. Ini berarti capaiannya sudah dibawah target yang sudah di tetapkan dengan jumlah penderita hipertensi 5.515 dari perkiraan 38.989 jiwa. Diharapkan jumlah hipertensi bisa terus menurun di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk diabetes melitus, pencapaiannya masih dibawah target yaitu 70% dengan jumlah kasus 671 jiwa dari perkiraan 1.028 Jiwa. Pada indikator perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi

dini kanker serviks dan payudara dengan melakukan pemeriksaan capaian masih jauh dibawa target yaitu 9,8% dari target 85%.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin mencapai target 58% dari target 75% dengan jumlah masyarakat Flores Timur yang dibiayai jaminan kesehatannya sebesar 172.839 jiwa.
8. Cakupan Peserta KB Aktif tidak mencapai target dimana dari target 65%, realisasi sebesar 31,2% dengan capaian kinerja 48,00% dalam kategori **Kurang**.
9. Cakupan Peserta KB Keluarga Miskin mencapai target dimana dari target 89%, realisasi sebesar 76% dengan capaian kinerja 83,39% dalam kategori **Baik**.

Hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Jumlah tenaga yang belum memadai terutama pada daerah yang sulit dijangkau.
2. Faktor perilaku masyarakat yang tidak serta merta mengadopsi semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan.
3. Kurangnya alokasi anggaran sehingga sehingga banyak hal yang direncanakan namun tidak terakomodir dalam anggaran.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menambah tenaga kesehatan terutama Tenaga Dokter dan Ahli Gizi dan Pemerataan Tenaga Kesehatan khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan maupun media cetak dan elektronik.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan
4. Meningkatkan koordinasi Lintas sektor mulai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
5. Meningkatkan Efektifitas Anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Tabel 3.13

Jumlah Tenaga dan Jenis Tenaga Kesehatan
Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Standar	Riil	Gab
1	Dokter Umum	38	33	- 5
2	Dokter Gigi	19	2	-17
3	Perawat	341	265	-76
4	Bidan	340	368	+28

5	Tenaga Gizi	58	33	-25
6	Tenaga Sanitarian	60	60	0
7	Apoteker	17	16	-1
Jumlah		873	777	

Adapun berbagai hambatan dan masalah yang di temukan antara lain :

1. Jumlah tenaga yang belum memadai terutama pada daerah yang sulit dijangkau
2. Faktor perilaku masyarakat yang tidak serta merta mengikuti semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan
3. Kurangnya alokasi anggaran sehingga banyak hal yang direncanakan tidak terakomodir dalam anggaran

Terkait masalah di atas solusi pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah :

1. Menambah tenaga kesehatan terutama tenaga dokter dan alih gizi dan pemerataan tenaga kesehatan khususnya pada daerah yang sulit dijangkau
2. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan maupun media cetak dan elektronik
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor mulai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta efektifitas anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.
5. Meningkatkan efektifitas anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Tabel 3.14

Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	83.839.963.456	55.853.212.591	66,62%
Rata-rata		83.839.963.456	55.853.212.591	66,62%

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah Rp. **55.853.212.591,-** dari target Rp. **83.839.963.456,-** atau sebesar 66,62%.

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas
Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ditangani	%	6,25	3,2	51,20	6,70	2,85	42,54
Rata-rata					51,20			42,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang atas Kesejahteraan Sosial**, 1 Indikator Sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 42,54 % mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 51,20%, dengan kategori **Kurang**. Berdasarkan hasil evaluasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial masih jauh dari target yang ditentukan. Beberapa PMKS yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2021 antara lain; Rumah Tangga Miskin penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 101.179 yang tersebar di 250 Desa/Kelurahan, Rumah Tangga Miskin sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di pencarian tahap IV sebanyak 12.823 KPM, Rumah Tangga Miskin Sebagai KPM Program bantuan pangan dan tunai (BPMT) atau program sembako sebanyak 15.526 KPM, Rumah Tangga Miskin yang diberdayakan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 38 Kelompok, Selain itu, Presentase PMKS yang tertangani ditahun 2021 sebesar 6,70% sedangkan realisasi capaian hanya sebesar 0,42%.

Tabel 3.16

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 6

No	Program / kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pemberdayaan social	1.041.392.500	1.038.918.100	99,76
2	Program rehabilitasi social	335.329.700	233.902.300	99,39

3	Program Perlindungan dan jaminan sosial	265.871.300	264.836.300	99,61
Rata-rata		1.642.593.500	1.537.656.700	93,61

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Rp. 1.537.656.700,- dari target Rp. 1.642.593.500,- atau sebesar 93,61%.

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Politik	%	41,94	27,5	65,57	42,50	27,5	64,71
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65	29	44,62	65	29	44,62
3	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	20	20	100	20	20	100
Rata-rata					70,06			69,77

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**, 1 indikator sasaran mencapai target sedangkan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 69,77%, dengan kategori **cukup**. Tidak mencapai target dikarenakan :

1. Belum memiliki *Grand Design* kependudukan;
2. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata kepada masyarakat terutama di wilayah DPPK dan miskin perkotaan;
3. Rasio tenaga PKB dan PLKB di bandingkan dengan wilayah binaan;
4. Pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah karena sering terjadi mutasi;
5. Kuantitas maupun kualitas pencatatan dan pelaporan dari tingkat lapangan sering terlambat dan belum akurat.

Solusi :

1. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak);
2. Memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan program KB;
3. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan;
4. Membuat *Grand Design* kependudukan;
5. Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.18

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 7

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	48.740.000	48.740.000	100
2	Program perlindungan perempuan	97.075.200	0	0
3	Program pengelolaan system data gender dan anak	22.691.700	18.941.700	83,5
4	Program pemenuhan hak anak (PHA)	30.458.600	29.938.600	98,3
Rata-rata		198.965.500	97.620.300	49,06

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Peran Perempuan Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak adalah Rp. 97.620.300,- dari target Rp. 198.965.500,- atau sebesar 49,06%.

Misi 2: Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

Diukur melalui 6 sasaran dengan 17 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan

melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.19

Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatkan Kinerja Transportasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik	Unit	2	2	100	1	1	100
2	Pengujian Angkutan Umum Laik Jalan	Kali	630	0	0	609	79	12,97
3	Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Unit	10	0	0	15	6	40
4	Rasio Izin Trayek	Dok	35	2	5,71	35	32	91
Rata-rata					26,42			60,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Kinerja Transportasi**, 2 indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 60,99 % dengan kategori **Cukup**.

Tabel 3.20

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 8

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	576.550.228	524.877.216	91,04
2	Program pengelolaan pelayaran	67.410.500	67.395.500	99,98
Rata-rata		643.960.728	592.272.716	91,97

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kinerja Transportasi adalah Rp. 592.272.716,- dari target Rp. 643.960.728,- atau sebesar 91,97%.

Tabel 3.21

Analisis Pencapaian Sasaran 9
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung
Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,41	0,42	102,44	0,41	0,39	95,12
2	Akses Air Minum Aman	%	100	100	100	100	81,58	81,58
3	Presentase Daerah Mata Air yang dikonservasi	Lokasi	10	11	110	3	0	0
Rata-rata					104,15			58,9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran **Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya**, 2 indikator sasaran mencapai target dan 1 indikator mengalami revokusing. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 58,9% dengan kategori **Cukup**. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 104,15%. Nilai realisasi tahun 2021 ini diperoleh dari :

1. Rasio jaringan irigasi dengan uraian kegiatan yaitu panjang Talud pengaman pantai dalam kondisi baik , nilai target sebesar 1.875 M¹/4.235.000 dengan realisasi capaian 3.739.700 dan peningkatan bangunan perkuatan tebing , nilai target sebesar 370 M¹/561.375.000 dengan realisasi capaian 554.137.000.
2. Akses Air minum aman, dengan uraian kegiatan yaitu terbangunnya instalasi air minum/ air bersih dan sanitasi yang menjangkau masyarakat dalam kategori **Baik**, nilai target sebesar 25.613 M¹/13.415.131.000 dengan realisasi capaian 38, 266 M¹/ 11.240.626.865.

Pencapaian diatas tidak luput pula dari hambatan/kendala yang dihadapi. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian mengenai kesesuaian antara Renstra, Tapkin dan data untuk penyusunan LKIP.
2. Ada beberapa kegiatan yang gagal lelang karena kurangnya penyedia barang dan jasa.
3. Kurang memperhatikan yang bersifat urginitas akan Paket dari pada Program Kegiatan.

4. Kurang Efisiensi dan efektivitas dalam proses kinerja.
5. Masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Keterbatasan Sumber daya manusia
7. Keterbatasan alokasi Dana

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diperlukan upaya-upaya untuk mendapatkan solusi diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemenuhan data yang melibatkan Elemen - elemen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan . Selanjutnya kedepan perlu diadakan persamaan persepsi melalui peningkatan pemahaman seluruh bidang mengenai akuntabilitas kinerja terutama LKIP.
2. Seluruh kegiatan proses pelelangan dipercepat terutama untuk pelelangan penyedia Konsultansi Perencanaan.
3. Skala Prioritas yang bersifat urgenitas akan Paket daripada Program Kegiatan.
4. Efisiensi dan efektivitas di utamakan dalam proses kinerja.
5. Meminimalisir masalah yang muncul di Lapangan ketika pelaksanaan Program Kegiatan
6. Menggali potensi sumber dana sebagai Pendapatan
7. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.22

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 9

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengelolaan sumber daya air	565.610.000	557.876.700	98,63
2	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	16.263.708.813	13.914.388.115	85,55
3	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	116.619.900	116.270.630	99,70
Rata-rata		16.380.328.713	14.030.658.745	85,65

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial Budaya di tahun 2021 adalah Rp. 14.030.658.745,- dari target Rp. 16.380.328.713,- atau sebesar 85,65 %.

Tabel 3.23

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Mengurangi Resiko Akibat Bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai yang dibangun	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam**, 1 Indikator Sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Rasio jaringan irigasi dengan uraian kegiatan yaitu panjang Talud pengaman pantai dalam kondisi baik , nilai target sebesar 1.875 M¹/4.235.000 dengan realisasi capaian 3.739.700 dan peningkatan bangunan perkuatan tebing , nilai target sebesar 370 M¹/561.375.000 dengan realisasi capaian 554.137.000.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi dimana Pekerjaan Fisik Pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mana dari 9 (Sembilan) paket pekerjaan baru dua paket yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2021 sementara yang tujuh paket lainnya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, disamping itu juga kegagalan tersebut disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mengerus semua anggaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi Pra Bencana, Saat Bencana Dan Pasca Bencana Yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Untuk itu diharapkan agar seluruh faktor penunjang bisa terpenuhi sehingga kinerja semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.24

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 10

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	565.610.000	557.876.700	98,63
Rata-rata		565.610.000	557.876.700	98,63

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Mengurangi Resiko Akibat Bencana Alam di tahun 2021 adalah Rp. 557.876.700,- dari target Rp. 565.610.000,- atau sebesar 98,63 %.

Tabel 3.25

Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	154	168	109,9	154	154	100
2	Presentase Rehabilitasi lahan kritis	Ha	8	9,8	122,50	-	-	100
Rata-rata					116,20			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**, 1 indikator sasaran mencapai target dan 1 indikator sasaran tidak dilaksanakan karena adanya refokusing. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100 % dengan kategori **baik**. Nilai ini diperoleh dari :

1. Selama tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan ijin lingkungan sebanyak 154 dokumen yang terdiri dari 146 dokumen SPPL, 1 Dokumen AMDAL dan 7 dokumen UKL-UPL. Capaian indikator kinerja sasaran adalah 154 usaha/kegiatan dari 154 usaha/kegiatan yang ditargetkan, sehingga presentase capaian sebesar 100%.

Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah:

1. Masih terbatasnya sarana pengangkut sampah;
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan akibat minimnya frekuensi keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis;
3. Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Solusi permasalahan adalah:

1. Berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana pengangkut sampah dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Pengembangan sumber daya aparatur teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan

Tabel 3.26

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 11

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program perencanaan lingkungan hidup	22.925.666	22.923.300	99,99
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	116.619.900	116.270.630	99,70
3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80.339.000	80.245.000	99,88
Rata-rata		219.884.566	219.438.930	99,79

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2021 adalah Rp. 219.438.930,- dari target Rp. 219.884.566,- atau sebesar 99,79%.

Tabel 3.27

Analisis Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rumah tidak layak huni	Unit	58	58	100	195	46	23,59
2	Akses limbah domestik Sanitasi layak	Unit	552	552	100	580	580	100
3	Akses air minum aman	SR	1.092	1.092	100	1768	1768	100

4	Presentasi Sampah Perkotaan yang ditangani	%	100	78	78	100	80,93	80,93
Rata-rata					94,5			76,13

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman**, 1 indikator sasaran tidak mencapai target dan 3 Indikator mencapai sasaran. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 76,13% dengan kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Rumah tidak layak huni, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target pembangunan BSPS pada Tahun 2021 adalah 195 unit rumah dengan realisasinya 46 Unit dari sumber dana APBD II sebesar Rp.690.201.200 dengan realisasi anggaran Rp.688.201.200 atau capaiannya sebesar 99,71%.
2. Akses limbah domestik Sanitasi layak, nilai realisasi capaian diperoleh dari kegiatan peningkatan pelayanan limbah domestik merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan limbah domestik dengan target 580 Unit dan realisasinya 580 unit.
3. Akses Air minum aman. Nilai realisasi diperoleh dari kegiatan peningkatan pelayanan air bersih merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Flores Timur dengan target 1768 SR dan realisasinya 1768 SR.
4. Persentase Sampah Perkotaan yang ditangani. Total sampah tertimbun selama tahun 2021 sebanyak $\pm 338.025,3\text{m}^3$ /tahun sedangkan volume sampah yang terangkut/dibuang ke TPA Sampah adalah sebanyak 30.775 m^3 . Sehingga capaian indikator kinerja sasaran sebesar 80,93%. Sesuai dengan capaian tersebut, maka sampah yang tidak terangkut sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak $\pm 7.250,3\text{m}^3$. Jika dibandingkan kinerja penanganan sampah tahun 2020 yang mencapai 78% dengan tahun 2021 yang mencapai 80,28%, maka terjadi kenaikan sebesar 2,93%. Pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur (1 Kelurahan).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran persentase penanganan persampahan diantaranya adalah :

- 1) Upaya pemilahan sampah rumah tangga belum dilakukan sehingga semua jenis sampah langsung dibuang ke bak sampah yang menyebabkan volume sampah semakin bertambah setiap hari.
- 2) Minimnya prasarana dan sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah (dump truk dan gerobak motor) dan sering terjadi kerusakan pada kendaraan pengangkut sampah.
- 3) Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan kota masih rendah.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah:

- 1) Berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana pengangkut sampah dalam rangka peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- 2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Tabel 3.28

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 12

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program kawasan pemukiman	10.110.646.500	10.104.414.547	99,94
2	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	21.620.000	21.590.000	99,86
3	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	16.263.708.813	13.914.388.115	85,55
4	Program pengembangan system dan pengelolaan dan persampahan regional	177.120.000	176.745.300	99,79
5	Program pengelolaan persampahan	1.016.423.865	1.015.638.270	99,92
Rata-rata		27.589.519.178	25.232.776.232	91,45

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman di tahun 2021 adalah Rp. **25.232.776.232,-** dari target Rp. **27.589.519.178,-** atau sebesar 91,45%.

Tabel 3.29

Analisis Pencapaian Sasaran 13
Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok	2	2	100	2	2	100
2	Cakupan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100	100	100
3	Pemenuhan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan	Lokasi	1	1	100	2	2	100
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran **Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota**. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori **baik**. Nilai capaian diperoleh dari :

1. Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, realisasi tercapai 2 dokumen atau 100%. Yang terdiri dari 2 Dokumen Perencanaan.
2. Cakupan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang mencapai sasaran ini sebesar 100 % dengan output jumlah Rekomendasi IMB sebesar 100% yang berdampak pada tertatanya kawasan sesuai dengan konsep penataan ruang.
3. Pemenuhan Penyediaan RTH di penataan dan pemeliharaan taman kota pada 2 kecamatan yaitu 8 lokasi dan kecamatan Adonara Timur 1 lokasi dengan luasnya 36.239M².

Tabel 3.30

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 13

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.098.115.500	1.080.643.900	98,4
2	Program penyelenggaraan penataan ruang	145.319.800	100.564.800	69,20

3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	251.916.000	250.423.900	99,41
Rata-rata		1.495.351.300	1.431.632.600	95,73

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota di tahun 2021 adalah Rp. 1.431.632.600,- dari target Rp. 1.495.351.300,- atau sebesar 95,73%.

Misi 3 : Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 11 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.31

Analisis Pencapaian Sasaran 14 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tanaman Perkebunan Jambu Mete	Ton	1867	1140	61,06	2687	1126	41,91
2	Tanaman Perkebunan Tembakau	Kg	800	787	93,38	0	0	100
3	Tanaman perkebunan Kelapa	Kg	0	0	0	4687	842	17,96
4	Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Pangan	Ha	110	0	0	220	0	0
5	Luas Lahan Pertanian Yang Dimanfaatkan Untuk Lahan Tanaman Holtikultural	Ha	14	0	0	30	0	0
6	Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan	Ha	570	404,82	71,02	300	293,38	97,79

7	Ketersediaan Pangan Energi	Kkap	2.386	3.382	141,74	3,243	3,243	100
8	Ketersediaan Pangan Protein	Gr	66.50	78,57	118,15	85,41	85,41	100
9	Ketersediaan Pangan Lemak	%	55.00	77,52	140,95	65,54	65,54	100
10	Presentasi Konsumsi Pangan	%	75	87,9	117,20	80,6	89,3	110,794
Rata-rata					83,16			66,84

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 indikator kinerja sasaran **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal**, 5 indikator sasaran mencapai target dan 5 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 66,84% dengan kategori **Cukup**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

1. Tanaman Perkebunan Jambu Mente. Realisasi hasil produksi jambu mente sebesar 1.240 ton, dimana merupakan hasil produksi jambu mente pada 5 Kecamatan utama sasaran Manja Mente tahun 2019 (data statistik Perkebunan tahun 2019). Hasil produksi jambu mente tahun 2020 baru dapat diketahui pada tahun 2021.
2. Tanaman Perkebunan Tembakau menggunakan dana bagi Hasil-Cukai tembakau (DBH-CHT) baik dari APBD II maupun APBD I, dari dana APBD II lebih diarahkan bagi 3 kelompok tani.
3. Tanaman Perkebunan Kelapa hasil realisasinya 842Kg dengan target awal 4687 Kg dengan capaian sebesar 17,96%.
4. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Pangan tidak mencapai target. Hambatan yang dihadapi adalah :
 - a. Kondisi iklim dan cuaca yang kurang kondusif seperti terlambatnya turun hujan, angin kencang menimbulkan terganggunya pertumbuhan tanaman baik fase vegetatif maupun generative. Akibatnya produktifitas tanaman menurun. Kondisi hujan juga telah menimbulkan pergeseran musim tanam dari biasanya yang menyebabkan panen akan terjadi pada tahun berikutnya.
 - b. Belum adanya penangkar benih yang profesional dalam menyediakan benih unggul dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, membuat rantai penyediaan benih bermutu/bersertifikat menjadi lebih panjang, akibatnya penyediaan benih bisa terlambat karena didatangkan dari luar Flores Timur.
 - c. Terbatasnya sumber daya petani/ kelompok tani spesialis dalam menguasai teknologi budidaya yang dianjurkan.

- d. Kurangnya fasilitas penyuluh seperti kebun contoh, demplot maupun teknologi spesifikasi lokasi yang ada di tengah masyarakat/petani.
 - e. Adanya bencana non alam nasional (Covid-19) yang mempengaruhi seluruh aktifitas perekonomian dan pengembangan pada berbagai sektor termasuk pertanian yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
 - f. Kurangnya dukungan dana APBD II untuk mendukung kegiatan fisik yang bersumber dari Kementerian Pertanian khususnya Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Hortikultura yang mempengaruhi frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada tingkat lapangan.
5. Luas Lahan Pertanian Yang Dimanfaatkan Untuk Lahan Tanaman Hortikultura. Kegiatan pengembangan hortikultura realisasi tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan, terjadinya refokusing anggaran akibat Covid-19 yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman hortikultura, Dukungan dana Shering dari APBD 2 sangat minim. Hal ini tentu sangat berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan atau bantuan yang bersumber dari dana APBD 1 maupun APBN dan Anomali iklim yang berdampak pada kerusakan tanaman sehingga berpoensi penurunan produksi.
 6. Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman Perkebunan mencapai 36,67% dari target RPJMD seluas 800 Ha. Namun adanya refocusing anggaran menyebabkan target luasan menurun menjadi 300Ha sehingga pencapaiannya 97,79% jika di bandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan pencapaian secara target luasan.
 7. Data Realisasi Ketersediaan Pangan Energi, Protein, Lemak serta Presentase Konsumsi Pangan mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%.

Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya sasaran antara lain :

1. Terbatasnya kapasitas sumber daya petani dan kelompok tani dalam menguasai dan menerapkan teknologi berusaha tani secara modern.
2. Kurangnya modal bagi petani untuk menyediakan saran produksi yang dibutuhkan
3. Masih terbatasnya aparatur dinas yang berkualifikasi spesialis di bidang pertanian
4. Kurangnya kesadaran petani/kelompok tani dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian yang telah dibangun

5. Terbatasnya personil, dana, maupun fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
7. Kondisi iklim dan cuaca seperti angin kencang dan hujan yang tidak menentu telah banyak merugikan petani. Cenderung bergesernya musim tanam telah membuat petani merubah jadwal tanam dan berpotensi mengorbankan benih yang telah disiapkan. Hal ini telah menguras waktu, tenaga dan biaya dari petani dan pihak dinas dalam upaya mengatasinya.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan/bimtek/magang dan demonstrasi penggunaan teknologi berusaha tani secara baik dan benar
2. Bekerja sama dengan mitra usaha petani/peternak seperti koperasi atau bank yang menyediakan paket-paket kredit usaha untuk menambah modal usaha petani/peternak
3. Memperjuangkan tambahan personil teknis yang berkualitas di bidang pertanian
4. Melaksanakan pelatihan atau bimtek bagi aparatur dinas di bidang pertanian
5. Meningkatkan pemantauan/monitoring dan pembinaan penggunaan prasarana dan sarana bagi petani dan kelompok tani penerima manfaat
6. Memerjuangkan Fasilitas pendukung kegiatan dan biaya operasional dalam memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dinas
7. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang ada di Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan informasi penting tentang cuaca dan memperjuangkan fasilitas pendukung untuk pencatatan data-data cuaca yang di butuhkan.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan pertanian secara berjenjang dan bersinergis dari tingkat petani/kelompok tani demi meningkatkan pembangunan pertanian dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan petani pada khususnya serta umumnya masyarakat Flores Timur.

Tabel 3.32

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 14

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program pengembangan prasarana pertanian	488.966.800	479.257.300	98,02
2	Program pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	42.120.000	41.714.000	99,03
3	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	983.523.150	315.687.050	73,55
4	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	58.020.000	57.638.000	99,34
Rata-rata		1.572.629.950	894.296.350	56,86

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokasi tahun 2021 adalah Rp. 894.296.350,- dari target Rp. 1.572.629.950,- atau sebesar 56,86%.

Tabel 3.33

Analisis Pencapaian Sasaran 15
Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penguatan Sistem Pemasaran	Kecamatan	2	2	100	1	1	100
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator Sasaran **Meningkatkan Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah**, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 100%, dengan kategori **baik**. Penguatan Sistem Pemasaran, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kegiatan Pengambilan data dan Publikasi Informasi Perdagangan melalui 2 Media yaitu media Cetak Flores Pos dan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Adapun hambatan / kendala :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis bidang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari refofusing anggaran terkait pandemi COVID 19.
2. Dalam melakukan proses pendataan khusus urusan perdagangan petugas seringkali mengalami kendala dimana pihak pelaku usaha yang keberatan memberikan data yang sebenarnya.
3. Masih terbatasnya sarana mobilitas dan sarana penunjang lainnya.

Tabel 3.34

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 15

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	19.450.000	18.450.000	94,9
Rata-rata		19.450.000	18.450.000	94,9

Realisasi anggaran untuk Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tahun 2021 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah Rp. 18.450.000,- dari target Rp. 19.450.000,- atau sebesar 94,9 %.

Misi 4 : Selamatkan Laut Flores Timur

Diukur melalui 2 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.35

Analisis Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penanganan <i>Illegal Fishing</i>	Kasus	10	10	100	9	9	100
1	Penanganan <i>destruktive e-fishing</i>	Kasus	10	10	100	1	1	100
2	Kawasan Konservasi Laut dalam Keadaan Baik (Biota Laut)	Jenis	10	10	100	10	10	100
Rata-rata					100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 Indikator Sasaran **Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**, 2 indikator sasaran mencapai target, Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 100 %, dengan kategori **baik**. Nilai capaian diperoleh dari :

1. Penanganan *illegal fishing* dan *destruktive fishing*, nilai realisasi diperoleh dari jumlah 10 Kasus yang ditangani dalam gelar operasi pengamanan sumber daya kelautan. Selain itu terdapat 35 Pokmaswas guna peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
2. Kawasan Konservasi Laut Dalam Keadaan Baik, nilai realisasi diperoleh dari jumlah biota laut yang dilindungi sebanyak 10 jenis. Selain itu, dilakukan pembinaan terhadap 92 Pokmaswas dalam pengamanan sumber daya kelautan.

Adapun kendala yang dihadapi, minimnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap dampak negatif akibat penangkapan ikan secara *destruktive fishing* dan *illegal fishing*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, meningkatkan peran aktif Pokmas Peduli Lingkungan untuk bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya laut dan perikanan.

Tabel 3.36

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 16

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	55.694.900	54.955.000	98,67
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	27.560.000	27.285.000	99,00
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	27.731.775	27.526.300	99,26
Rata-rata		110.986.675	109.766.300	98,90

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut di tahun 2021 adalah Rp. 109.766.300,- dari target Rp. 110.986.675,- atau sebesar 98,90 %.

Tabel 3.37

Analisis Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15,578	15,864	101,84	15,587	15,864	102
2	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	304,6	156	51,72	304,6	156	54,2
3	Luas Area Garam	Ha	2,5	-	-	2,5	0	0
4	Jumlah Produksi Garam	Ton	100	-	-	100	0	0
5	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya	Kelompok	45	50	111,11	45	50	111,11
Rata-rata					52,93			53,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatnya Produksi Perikanan**, 3 indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 53,46 %, dengan kategori **Kurang**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

- 1) Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap mencapai target dan hal ini sebanding dengan jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat nelayan, dimana pada tahun 2021 terdapat 14 Jenis sarana prasarana penangkapan yang disalurkan.
- 2) Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya belum mencapai target, dimana produksi perikanan budidaya mencapai 156 Ton dari target 304,6 Ton atau 54,2%.
- 3) Luas Area Garam dan Jumlah Produksi Garam (ton/tahun), 2 indikator sasaran tidak bisa diukur capaiannya, dikarenakan, masih dalam bentuk usaha rumah tangga (perorangan) dan belum didata secara baik dalam tahun 2020, sehingga luas dan produksi garam belum dapat dirilis oleh Dinas Perikanan. Solusi : pada tahun berikutnya akan dilakukan identifikasi dan pendataan area garam dan produksi garam.
- 4) Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan melebihi target yaitu 50 Kelompok dimana dari target 45 Kelompok perikanan budidaya.

Adapun kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Beberapa pelaku usaha perikanan yang tidak aktif melaksanakan usahanya
2. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
2. Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur maupun Nelayan (penangkapan dan paska penangkapan) serta kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatnya PAD.

Tabel 3.38

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 17

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Perikanan Tangkap	2.899.221.926	2.893.065.366	99,79
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tangkap	20.315.031	20.155.000	99,21
3	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	27.731.775	30.925.000	99,26
Rata-rata		2.947.268.732	2.944.145.366	99,89

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan adalah Rp. 2.944.145.366,- dari target Rp. 2.947.268.732,- atau sebesar 99,89 %.

Misi 5 : Reformasi Birokrasi

Diukur melalui 2 sasaran dengan 20 indikator kinerja sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 3.39

Analisis Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	7	7	100
2	Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	10	10	100	3	3	100
3	Rasio Penduduk yang Ber KTP per satu penduduk	%	20.000	19.291	96,46	90	95	105,55
4	Rasio Pasangan yang Ber Akta Nikah	%	20,36	20,11	98,77	22	22	100
5	Rasio Penduduk yang Ber Akte Kelahiran	Akte	35.000	10.976	31,36	54	75	138,88
6	Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2300	2070	90,00	2400	1281	53,38
7	Pola Pengembangan Karier ASN daerah	Orang	206	470	228,16	206	183	88,83

8	Ketersediaan dokumen Perencanaan	Dok	Ada	ada	100	ada	Ada	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada	ada	100	ada	Ada	100
10	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	Ada	ada	100	ada	Ada	100
11	Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP	-	-	WTP	-	-
12	OPD yang menerapkan Sisten Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi	OPD	30	30	100	30	30	100
13	Desa Sadar Hukum dan Komunitas	%	15,30	8,73	57,06	100	4,40	4,4
14	Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	121	33	27,27	2	2	100
15	Cakupan pelayanan Korban Bencana	%	100	100	100,00	100	100	100
Rata-rata capaian					88,61			86,06

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, 2 indikator sasaran tidak mencapai target dan 13 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 86,06% kategori **baik**. Nilai capaian ini diperoleh dari :

- Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan, mencapai target, dimana terdapat 7 OPD pelaksanaan dengan 6 bidang pelayanan antara lain :
 - Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
 - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- Jumlah OPD yang memiliki SOP, pada tahun 2021 mencapai target, karena melakukan koordinasi dengan baik kepada semua OPD baik melalui surat maupun konsultasi. 3 SOP tersebut antara lain :

- 1) Perbup No 32 Tahun 2021 tentang SOP AP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur
- 2) Perbup No 75 Tahun 2021 tentang SOP AP Perkebunan dan Peternakan Kab. Flores Timur
- 3) Perbup No 80 Tahun 2021 tentang SOP AP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Flores Timur
3. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk dengan capaian sebanyak 105,55%, Rasio pasangan berakta nikah dengan capaian sebanyak 100% dan Rasio penduduk berakte kelahiran dengan capaian sebanyak 138,88%.
4. Jumlah Izin yang dilayani tiap tahun belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 2.070 perizinan. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kesadaran masyarakat yang bergerak di bidang usaha dalam pengurusan ijin.
5. Pola Pengembangan karier ASN Daerah, realisasi di tahun 2021 sebesar 183 % dari target 206% dan capaian kinerja 88,83%. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
6. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
7. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.
8. Penilaian terhadap kinerja Pengelolah Keuangan Daerah Tahun 2021 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga hasil penilaian masih berproses.
9. OPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi mencapai target karena tahun 2021 semua OPD sudah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
10. Desa Sadar Hukum dan Komunitas tidak mencapai target akibat refocusing anggaran sehingga terealisasi 4,40 pendampingan pada indicator ini
11. Cakupan Pelayanan Korban Bencana belum mencapai target. Adapun Permasalahan yang terjadi :
 - 1) Belum disediakan dana siap pakai (DSP) yang dipangkukan dalam RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 99 (2),

sehingga dalam upaya penanganan darurat kebencanaan sering terlambat hanya karena alasan “birokrasi” keuangan;

- 2) Adanya wabah covid 19 yang merambah secara menggelombang yang membuat roda pemerintahan serta penghidupan masyarakat hampir lumpuh pada semua lini serta penghidupan masyarakat tidak berjalan normal sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Dana/Penganggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dalam hal ini Bantuan Stimulan yang diberikan kepada korban bencana dipangkukan dalam Dana Tak Terduga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sehingga proses pencairan dana tersebut sampai ke rekening korban harus membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan.

Sehingga Solusinya antara lain :

- 1) Penanganan darurat bencana untuk sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana yaitu BPBD Kabupaten Flores Timur mengajukan proposal ke BNPB RI terkait kerusakan tersebut untuk mendapatkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) agar penanganan darurat bencana segera dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi fisik sarana dan prasarana yang rusak.
- 2) Perlunya diterapkan aturan yang baku baik pada lini pemerintahan maupun masyarakat secara umumnya agar kehidupan dalam masa *new normal* semua elemen masyarakat tetap patuh dan taat akan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan bersama dan memperhatikan efek yang diterima apabila protokol kesehatan tidak diterapkan.
- 3) Untuk penanganan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana/pasca bencana, BPBD Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan BNPB RI melalui pengajuan proposal yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak sehingga kehidupan masyarakat di sekitar lokasi akan menjadi nyaman.
- 4) Perlunya disikapi secara cepat dan tepat agar dana hibah yang dipangkukan pada APBD Tahun Anggaran 2020-2021 untuk kegiatan fisik pasca bencana agar segera dilaksanakan tepat waktu guna untuk menjaga normalisasi serta ikatan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tabel 3.40

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 18

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	132.822.600	131.648.671	99,12
2	Program pendaftaran penduduk	773.086.700	704.283.601	91,10
3	Program pencatatan sipil	466.367.200	461.945.675	99,05
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4.010.000	3.910.126	97,51
5	Program pelayanan penanaman modal	86.979.900	86.979.700	99,99
6	Program kepegawaian daerah	1.597.365.583	1.488.168.783	93,16
7	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.098.115.500	1.080.643.900	98,4
8	Program pengelolaan keuangan daerah	275.425.308.264	274.209.880.181	99,56
9	Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat <i>Kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah</i>	305.732.800	304.215.057	99,50
10	Program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	38.325.000	32.735.000	85
11	Program penanggulangan bencana	16.011.329.800	15.148.837.600	94,61
Rata-rata		295.939.443.347	293.653.248.294	99

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah Rp. 293.653.248.294,- dari target Rp. 295.939.443.347,- atau sebesar 99 %.

Tabel 3.41

Analisis Pencapaian Sasaran 19
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih
dan Efektif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Tahun 2021		Capaian kinerja tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Desa Sangat Tertinggal	%	0	0	100	0	0	100
2	Desa Tertinggal	%	56,77	13,10	23,08	4,57	10,48	229
3	Desa Berkembang	%	34,06	77,29	226,92	31,65	72,49	229
4	Desa Maju	%	8,30	9,1	109,64	6,86	15,72	229
5	Desa Mandiri	%	0,87	0,43	49,43	0,57	1,31	230
Rata-rata					101,81			203,4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 Indikator Kinerja Sasaran **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif**, 5 indikator sasaran melebihi capaian dengan nilai 203,4% masuk dalam kategori **baik sekali**. Semakin sedikit atau kecil jumlah desa sangat tertinggal, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya semakin berhasil. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk Kabupaten Flores Timur tidak terdapat desa sangat tertinggal, terdapat 30 desa tertinggal, 177 desa berkembang, 21 desa maju dan 1 desa mandiri. Untuk Tahun 2020 status desa mengalami peningkatan status desa yang cukup baik terlihat dari angka Desa Tertinggal yang sudah tersisa 30 Desa dari 195 Desa Tertinggal pada awal tahun perencanaan dan Desa sangat Tertinggal dari 1 Desa pada tahun 2019, kini di Tahun 2020 menjadi 0.

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
2. Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.

Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.

2. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
3. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
2. Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur pemerintah Desa maupun Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif.

Tabel 3.42

Program Pendukung dan Anggaran Sasaran 19

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	130.005.000,-	129.990.000,-	99,99
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	53.003.325,-	52.903.600,-	99,81
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	272.653.750,-	272.279.650,-	99,86
4	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	191.748.900,-	191.748.900,-	100
Rata-rata		647.410.975,-	646.922.150,-	99,92

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, adalah Rp.646.922.150,- dari target Rp. 647.410.975,- atau sebesar 99,92 %.

3.3

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab. Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD maupun

Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43

Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2021

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENDAPATAN	1.113.060.995.932,00	1.062.316.357.766,09	95,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.164.582.902,00	57.885.086.926,87	73,11
1.1.1	Pajak Daerah	16.003.000.000,00	11.244.410.174,12	70,26
1.1.2	Retribusi Daerah	31.278.383.400,00	29.497.393.569,00	94,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	4.677.955.033,00	93,55
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26.883.199.502,00	12.465.328.150,75	46,36
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.033.161.181.466,00	1.004.231.270.839,22	97,19
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.006.163.032.117,00	986.392.686.732,22	98,03
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.998.149.349,00	17.838.584.107,00	66,07
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	735.231.564,00	200.000.000,00	27,20
1.3.1	Pendapatan Hibah	735.231.564,00	200.000.000,00	27,20
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0
2	BELANJA DAERAH	1.164.307.516.585,22	1.072.539.919.924,95	92,11
2.1	BELANJA OPERASI	741.688.003.725,22	664.656.440.953,68	89,61
2.1.1	Belanja Pegawai	453.413.496.702,22	407.722.841.261,00	89,92
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	253.538.228.367,00	223.404.514.036,68	88,11
2.1.3	Belanja Subsidi	1.079.903.000,00	500.420.000,00	46,33
2.1.4	Belanja Hibah	33.046.125.656,00	32.418.846.656,00	98,10
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	610.250.000,00	609.819.000,00	99,92
2.2	BELANJA MODAL	153.580.617.596,00	139.726.693.412,27	90,97
2.2.1	Belanja Modal Tanah	9.781.427.000,00	9.753.805.032,00	99,71
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.705.364.681,00	50.944.171.561,00	96,65
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.164.224.361,00	31.360.680.876,81	78,08
2.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	48.732.787.413,00	45.789.975.020,00	93,96
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.196.814.141,00	1.878.060.922,46	85,49
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.735.231.564,00	12.133.335.513,00	95,27
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.735.231.564,00	12.133.335.513,00	95,27
2.4	BELANJA TRANSFER	256.303.663.700,00	256.023.450.046,00	99,89
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.553.000.000,00	1.309.357.347,00	84,31
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	254.750.663.700,00	254.714.092.699,00	99,98
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.246.520.653,22	52.246.688.454,00	100,00

3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.146.520.653,22	52.146.520.654,00	100
3.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.167.800,00	100,16
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
4.1	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
PEMBIAYAAN NETTO		51.246.520.653,22	51.246.688.454,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	41.023.126.295,14	0

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2021 (Sebelum Audit BPK RI)

Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. **1.113.060.995.932,00** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.062.316.357.766,09** atau **95,44%**. Capaian realisasi dari 3 komponen utama pembentuk Pendapatan adalah PAD mencapai 73,11%, Pendapatan Transfer dengan Capaian sebesar 97,19% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 27,20%. Pada akun belanja secara total ditargetkan sebesar Rp. **1.164.307.516.585,22** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1.072.539.919.924,95** atau 92,11%. Belanja Daerah terdiri dari 4 kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Secara total Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 741.688.003.725,22 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 664.656.440.953,68 atau 89,61%. Belanja Modal adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi, Dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Secara total Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 153.580.617.596,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 139.726.693.412,27 atau 90,97%. Belanja Tidak Terduga terdiri target Rp. 12.735.231.564,00 dan Mencapai realisasi RP.12.133.335.513,00 atau 95,27%. Sedangkan Belanja Transfer adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Secara total Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 256.303.663.700,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 256.023.450.046,00 atau 99,89%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 19 sasaran yang mencakup 92 indikator sasaran, bahwa 3 indikator sasaran atau 15,80%, 9 indikator sasaran atau 47,36 %, 4 indikator sasaran atau 21,05% dan 3 indikator sasaran atau 15,80%. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **89,28 %** dengan kategori **Baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2021 **Baik**.

Namun demikian, dari 92 indikator kinerja terdapat beberapa indikator sasaran tidak di realisasikan di karenakan mengalami refokusing anggaran, berikut indikator yang mengalami refokusing yaitu Daerah mata air yang di konservasi, Rehabilitasi lahan kritis, Tanaman Perkebunan Tembakau, Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan, Luas Lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan Tanaman Holtikultural Luar Area Garam, dan Luas Produksi Garam.

4.2 Saran Tindak Lanjut

Hal-hal yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, antara lain :

1. Melakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya sehingga dapat berorientasi hasil/*outcome* dan memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
2. Menentukan indikator sasaran yang dapat diukur sehingga keberhasilan kinerja daerah dapat diyakini.
3. Perlu dilaksanakannya bimbingan teknik penyusunan indikator kinerja utama pada setiap OPD, dalam proses penyusunan RENSTRA OPD yang merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan OPD sehingga adanya keselarasan

disetiap dokumen dan dapat menggambarkan kinerja Daerah sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada.

4. Perlu peningkatan pengendalian, evaluasi dan pemantapan koordinasi serta sistem informasi kinerja yang dapat dipublikasikan tentang kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor dan keterlibatan stakeholders untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan pada semua tingkatan pemerintahan.

KABUPATEN FLORES TIMUR

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. IteLewoTolok no. Tlp. (0383)21091
LARANTUKA

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas. Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil Reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan kinerja ini.



Larantuka, 10 Maret 2022

Inspektoral Daerah Kabupaten Flores Timur, *L*

Antonius
Antonius Lebi Raya, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP.19651023 199503 1 002

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	55	29	52,73	Kurang
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,06	3,15	152,91	Baik Sekali
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik social antar pemuda	Kasus	0	0	100	Baik
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,30	99,46	Baik
		5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	48	67,54	140,71	Baik Sekali
		6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	91,02	88,47	97,20	Baik
		7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	71,62	69,9	97,60	Baik
		8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	89,63	194,85	Baik Sekali
		9) Angka Partisipasi Kasar (APK)SD	%	105	101,57	96,73	Baik
		10) Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP	%	99	94,64	95,60	Baik
		11) Angka melek huruf	%	99,85	99,52	99,97	Baik
		12) Angka buta huruf	%	1	2,89	289	Baik Sekali
		13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD	%	100	100	100	Baik
		14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP	%	97,59	110,26	113	Baik Sekali
		15) Angka kelulusan (AL) SD /MI	%	99,99	100	100,01	Baik Sekali
		16) Angka kelulusan (AL) SMP /MTs	%	98,8	100	101,21	Baik Sekali
		17) Guru yang memenuhi kualifikasi S1	%	100	81,05	81,05	Baik
		18) Persentase sarana prasarana pendidikan SD dalam kondisi baik	%	60,24	22,95	38,10	Kurang
		19) Persentase sarana prasarana pendidikan SMP dalam kondisi baik	%	70,02	26,94	38,47	Kurang

5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup	Tahun	66,9	65,7	98,20	Baik
		21) Angka Kematian Bayi	%	17/1000	11,1/1000	153,15	Baik Sekali
		22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH)	%	110/100.000	149/100.000	73,83	Cukup
		23) Angka gizi buruk	%	0,3	0,4	75,00	Cukup
		24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar	%	100	35	35	Kurang
		25) Cakupan pelayanan usia produktif	%	90	34,6	38,44	Kurang
		26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular	%	88	74	84	Baik
		27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular	%	50	54	108	Baik Sekali
		28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	99,4	99,40	Baik
		29) Penemuan penderita baru penyakit TB – BTA+	%	95	19	20	Kurang
		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	Baik
		31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	75	58	77,33	Baik
		32) Cakupan peserta KB aktif	%	65	31,2	48,00	Kurang
		33) Cakupan pelayanan KB keluarga miskin	%	89	76	83,39	Baik
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,70	2,85	42,54	Kurang
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik	%	42,50	27,5	64,71	Cukup
		36) Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65	29	44,62	Kurang
		37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20	20	100	Baik
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Unit	1	1	100	Baik
		39) Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	609	79	12,97	Kurang
		40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	15	6	40	Kurang
		41) Rasio izin trayek	Dok	35	32	91	Baik
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, social dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi	%	0,41	0,39	95,12	Baik
		43) Akses air minum aman	%	100	81,58	81,58	Baik
		44) Presentase Daerah mata air yang dikonservasi	Lokasi	3	0	0	Kurang
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100	100	100	Baik
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis Usaha	154	154	100	Baik
		47) Presentase Rehabilitasi lahan kritis	Ha	-	-	100	Baik

12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni	Unit	195	46	23,59	Kurang
		49) Akses limbah domestik sanitasi layak	Unit	580	580	100	Baik
		50) Akses air minumaman	SR	1768	1768	100	Baik
		51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	100	80,93	80,93	Baik
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan	Dok	2	2	100	Baik
		53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100	100	100	Baik
		54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	2	2	100	Baik
14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasispotensi local	55) Tanaman perkebunan Jambu Mete	Ton	2687	1126	41,91	Kurang
		56) Tanaman Perkebunaan Tembakau	Kg	0	0	0	Kurang
		57) Tanaman perkebunan Kelapa	Kg	4687	842	17,96	Kurang
		58) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman pangan	Ha	220	0	0	Kurang
		59) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura	Ha	30	0	0	Baik
		60) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan	Ha	300	293,38	97,79	Baik
		61) Ketersediaan pangan energi	kkal	3,243	3,243	100	Baik
		62) Ketersediaan Pangan Protein	gr	85,41	85,41	100	Baik
		63) Ketersediaan Pangan Lemak	gr	65,54	65,54	100	Baik Sekali
		64) Persentasi Konsumsi Pangan	%	80,6	89,3	110,794	
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	65) Penguatan sistem pemasaran	Kecamatan	1	1	100	Baik
16.	Meningkatnya kelestariansumber dayahayati laut	66) Presentase Penanganan <i>ilegal fishing</i>	Kasus	9	9	100	Baik
		67) Presentase Penanganan <i>destrucktivefishing</i>	Kasus	1	1	100	Baik
		68) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik (Biota)	Jenis	10	10	100	Baik
17.	Meningkatnya produksi perikanan	69) Presentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	15.578	15,864	102	Baik Sekali
		70) Presentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton	304,6	156	54,2	Kurang
		71) Luas Area Garam	Ha	2,5	-	-	Kurang
		72) Jumlah Produksi Garam	Ton	100	-	-	Kurang
		73) Jumlah kelompok budidaya	Kelompok	45	50	111,11	Baik Sekali

18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	74) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	OPD	7	7	100	Baik
		75) Jumlah OPD yang memiliki SOP	OPD	3	3	100	Baik
		76) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	90	95	105,55	Baik Sekali
		77) Rasio pasangan berakta nikah	%	22	22	100	Baik
		78) Rasio penduduk berakte kelahiran	Akte	54	75	138,88	Baik Sekali
		79) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun	Izin	2400	1281	53,38	Kurang
		80) Pola pengembangan karier ASN daerah	Orang	206	183	88,83	Baik
		81) Ketersediaan dokumen perencanaan	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		82) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		83) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda	Dok	Ada	Ada	100	Baik
		84) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah	Opini	WTP	-	-	-
		85) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD	30	30	100	Baik
		86) Desa Sadar Hukum dan Komunitas	%	100	4,40	4,4	Cukup
		87) Jumlah Konflik sosial yang terjadi dimasyarakat	Kasus	2	2	100	Baik
		88) Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100,00	Baik
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	89) Desa sangat tertinggal	%	-	-	100	Baik
		90) Desa tertinggal	%	4,57	10,48	229	Baik Sekali
		91) Desa berkembang	%	31,65	77,49	229	Baik Sekali
		92) Desa maju	%	6,86	15,72	229	Baik Sekali
		93) Desa mandiri	%	0,57	1,31	230	Baik Sekali
Rata-Rata Pencapaian Sasaran						89,28	Baik

Larantuka, Maret 2021

BUPATI FLORES TIMUR

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

LAMPIRAN III



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST
Jabatan : BUPATI FLORES TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Larantuka, Januari 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON,
ST

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1) Jumlah wirausahawan baru	UMKM	55
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,15
3.	Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	3) Jumlah konflik sosial antar pemuda	Kasus	0
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	4) Rata Lama Sekolah 5) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD 7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 9) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 10) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 11) Angka melek huruf 12) Angka buta huruf 13) Angka melanjutkan pendidikan Ke SD 14) Angka melanjutkan pendidikan Ke SMP 15) Angka kelulusan (AL) SD /MI	Tahun % % % % % % % % % % % % % %	7,34 48 91,02 71,62 46 105 99 99,85 1 100 97,59 99,99 98,8 100 60,24 70,02
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20) Usia Harapan Hidup 21) Angka Kematian Bayi 22) Angka kematian Ibu (Per 100.000 KH) 23) Angka gizi buruk 24) Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar 25) Cakupan pelayanan usia produktif 26) Cakupan penanganan kasus penyakit menular 27) Cakupan penanganan kasus penyakit tidak menular 28) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Tahun % % % % % % % % %	66,9 17/1000 110/100.000 0,3 100 90 88 50 100 95

		30) Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
		31) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	75
		32) Cakupan peserta KB aktif	%	65
			%	89
6.	Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	34) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	%	6,70
7.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	35) Partisipasi perempuan pada jabatan politik	%	45,50
		36) Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	65
		37) Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	%	20
8.	Meningkatnya kinerja transportasi	38) Prasarana transportasi dalam kondisi baik	Unit	1
		39) Pengujian Angkutan umum laik jalan	Kali	609
		40) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Unit	15
			Dok	91
9.	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	42) Rasio jaringan irigasi	%	0,41
		43) Akses air minum aman	%	100
		44) Presentase Daerah mata air yang dikonservasi	lokasi	3
10.	Mengurangi resiko akibat bencana	45) Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	%	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	46) Presentase Usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	Jenis	154
		47) Presentase Rehabilitasi lahan kritis	Ha	0
12.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	48) Rumah tidak layak huni	Unit	195
		49) Akses limbah domestik sanitasi layak	unit	580
		50) Akses air minum aman	SR	1768
		51) Persentase Sampah perkotaan yang ditangani	%	100
13.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	52) Jumlah dokumen perencanaan	Dok	2
		53) Cakupan pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	100
		54) Pemenuhan penyediaan RTH dikawasan perkotaan	Lokasi	2

14.	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi local	55) Tanaman perkebunan Jambu Mente 56) Tanaman perkebunan Tembakau 57) Tanaman perkebunan Kelapa 58) Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan 59) Luas lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman hortikultura 60) Luas lahan Pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman perkebunan 61) Ketersediaan pangan energi	Ton Kg Kg Ha Ha Kkap Gr Gr %	2687 0 4687 220 30 300 3,243 85,41 65,64 80,6
15.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	65) Penguatan sistem pemasaran	kecamatan	1
16.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	66) Presentase Penanganan <i>illegal fishing</i> 67) Presentase Penanganan <i>destruktive fishing</i> 68) Kawasan konservasi laut dalam keadaan baik	Kasus Kasus Jenis	9 1 10
17.	Meningkatnya produksi perikanan	69) Presentase Peningkatan produksi perikanan tangkap 70) Presentase Peningkatan produksi perikanan budidaya 71) Luas area garam	Ton Ton Ha Ton kelompok	15.578 304,6 2,5 100 45
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	74) Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan 75) Jumlah OPD yang memiliki SOP 76) Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk 77) Rasio pasangan berakta nikah 78) Rasio penduduk berakte kelahiran 79) Jumlah izin yang dilayani tiap tahun 80) Pola pengembangan karier ASN daerah 81) Ketersediaan dokumen perencanaan 82) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda 83) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perda 84) Penilaian terhadap kinerja pengelola keuangan daerah 85) OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	OPD OPD % % % Izin Orang Dok Dok Dok Opini OPD % Kasus %	7 3 90 22 54 2400 206 Ada Ada Ada WTP 30 100 5 100
19.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	89) Desa sangat tertinggal 90) Desa tertinggal 91) Desa berkembang	% % % %	0 10,48 72,49 15,72 1,31

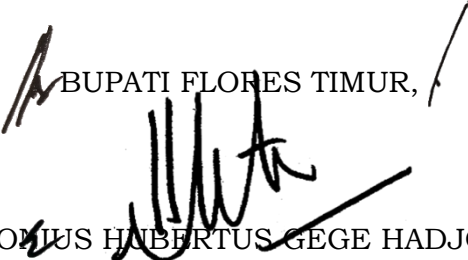
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Orang Muda			
1.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	260.421.000,-	APBD II
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	28.665.500,-	APBD II
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	51.730.000,-	APBD
2.	Program Hubungan Industrial	18.147.100,-	APBD
3.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.920.000,-	APBD
Sasaran 3 : Meningkatnya Karakter Orang Muda Dan Wawasan Kebangsaan			
1.	Program perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial <i>Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah aktual</i>	90.051.500,-	APBD
2.	Program perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial <i>kegiatan Fasilitasi tim terpadu penanganan Konflik Sosial</i>	56.550.000,-	APBD
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	49.143.618.851,-	APBD
2.	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	209.055.000,-	APBD
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.853.212.591,-	APBD
Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.038.918.100,-	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	233.902.300,-	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	264.836.300,-	APBD
Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak			
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	48.740.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	0	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	18.941.700,-	APBD
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	29.938.600,-	APBD
Sasaran 8 : Meningkatnya Kinerja Transportasi			
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	524.877.216,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	67.395.500,-	APBD
Sasaran 9 : Meningkatnya Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	557.876.700,-	DAU

2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.914.388.115,-	DAU
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	116.270.630,-	DAU
Sasaran 10 : Mengurangi Resiko Akibat Bencana			
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	557.876.700,-	APBD
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	22.923.300,-	DAU
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	116.270.630,-	DAU
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	80.245.000,-	DAU
Sasaran 12 : Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Perumahan Dan Lingkungan Permukiman			
1.	Program Kawasan Permukiman	10.104.414.547,-	APBD
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah B3	21.590.000,-	DAU
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.914.388.115,-	APBD
4.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	176.745.300,-	DAU
5.	Program Pengelolaan Persampahan	1.015.638.270,-	DAU
Sasaran 13 : Terwujudnya Perencanaan Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota			
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.080.643.900,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan penataan ruang	100.564.800,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	250.423.900,-	DAU
Sasaran 14 : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal			
1.	Program pengembangan prasarana Pertanian	479.257.300,-	APBD
2.	Program Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	41.714.000,-	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	315.687.050,-	APBD
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	57.638.000,-	APBD
Sasaran 15 : Meningkatnya Volume Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah			
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	18.450.000,-	APBD
Sasaran 16 : Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut			
1.	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	54.955.000,-	DAU
2.	Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	27.285.000,-	DAU
3.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	27.526.300,-	DAU
Sasaran 17 : Meningkatnya Produksi Perikanan			
1.	Program Perikanan Tangkap	2.893.065.366,-	DAU

2.	Program Pengembangan Budidaya perikanan	20.155.000,-	DAU
3.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	30.925.000,-	DAU
Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Program Fasilitasi Pelayanan Public dan Tata Laksana	131.648.671,-	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	704.283.601,-	Dak Non Fisik
3.	Program Pencatatan Sipil	461.945.675,-	Dak Non Fisik
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.910.126,-	APBD II,
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	86.979.700,-	APBD
6.	Program Kepegawaian Daerah	1.488.168.783,-	APBD
7.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.080.643.900,-	APBD
8.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	275.425.308.264,-	APBD
9.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat <i>Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	304.215.057,-	APBD
10.	Program Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.735.000,-	APBD
11.	Program Penanggulangan Bencana	15.148.837.600,-	APBD
Sasaran 19 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif			
1.	Program Penataan Desa	32.360.000,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	699.812.400,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	386.709.800,-	APBD

Larantuka, Januari 2022


 BUPATI FLORES TIMUR,
 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya PNS OPD, Guru, Pengawas, Pamong Belajar	1. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (PAUD) 2. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (SD) 3. Jumlah guru, pengawas dan pamong belajar yang dinilai (SMP)	20 orang 50 orang 30 orang
2.	Meningkatnya kualitas layanan PAUD	Persentase APK, APM PAUD 1. APK PAUD 2. APM PAUD	48% 53%
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	- APK, APM wajib belajar sembilan tahun - APK SD - APM SD - APK SMP - APM SMP - APM Paket C - Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/MI - SMPMTS - Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTS - Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTS - Angka melanjutkan (AM) - Ke SD/MI - Ke SMP/MTS - Fasilitas pendidikan - SD/MI kondisi bangunan baik - SMP/MTS kondisi bangunan baik - Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar - Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar - Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD	105% 91,02% 99% 71% 94,45% 6100 siiswa 5200 siswa 0,30% 0,90% 99,99% 92,28% 100% 98,50% 42% 26% 100% 88,80% 70%

1	2	3	4
4.	Menurunnya penduduk yang buta huruf	Persentase penurunan angka buta huruf	100%
5.	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi	39,96%
2.	BIDANG KESEHATAN		
1.	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi	1. Angka kematian Ibu (per 100.000 KH) 2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 3. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Kebidanan 5. Cakupan Pelayanan Nifas 6. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet	102 98 100 100 100 100 100
2.	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak serta Status Gizi	1. Angka kematian Bayi (per 1.000 KH) 2. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 3. Cakupan pelayanan anak Balita 4. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1) 5. Cakupan kunjungan bayi 6. Angka Gizi Buruk 7. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 8. Prevalensi kekurangan gizi 9. Prevalensi Stunting 10. Cakupan balita yang mendapat KMS 11. Cakupan balita ditimbang di Posyandu 12. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 13. Cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 14. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat vitamin A 15. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah 16. Presentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 17. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	16 100 100 100 100 0,1 100 9 28 100 100 100 98 100 30 45

1	2	3	4
		18. Pelayanan kesehatan usia produktif	100
		19. Cakupan peserta KB Aktif	90
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	1. Cakupan Desa Siaga Aktif 2. % Posyandu Pusnema + mandiri 3. Cak Rumah Tangga Ber PHBS 4. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 5. Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan 6. Persentase Rumah Tangga dengan sumber Air Minum Bersih 7. Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat Kesehatan 8. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan 9. Persentase cakupan rumah sehat	75 80 100 250 90 85 85 70 65
4.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Tuber Colosis (TB) 2. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis 3. Persentase kesembuhan TB 4. Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita Baru TB BTA (+)/ 5. Persentase Peningkatan Penemuan Penderita Baru TB BTA (+) 6. Persentase penemuan dan pengobatan kasus Pneumonia pada Balita 7. Persentase Demam Berdarah Dengui (DBD) yang ditangani 8. Persentase penurunan kesehatan DBD per 100.000 penduduk 9. Persentase Angka Kematian Rabies Per 10.000 Penduduk 10. Persentase penurunan kesakitan Diare per 1.000 penduduk 11. Persentase penurunan kesakitan Malaria per 1.000 penduduk 12. Annual parasit insiden 13. Persentase penurunan kesakitan kusta per 100.000 penduduk 14. Persentase angka kasus HIV yang diobati 15. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV secara standar	62 100 100 100 100 35 100 0 0 55 0 85 15 94 100

1	2	3	4
		16. Persentase penurunan angka kesakitan filariasis per 10.000 penduduk 17. Prevalensi tekanan darah tinggi 18. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 19. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	95 15 100 80
5.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi Diabetes Melitus 2. Presentae puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 3. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini Kanker Serviks dan Payudara 5. Persentase pelayanan kesehatan terhadap ODGJ 6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 7. Cakupan Desa UCI 8. Persentase sinyal kewaspadaan Dini yang direspon	6 100 100 100 100 100 100 100
6.	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan bagi seluruh Penduduk khususnya Penduduk Miskin	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pembiayaan kesehatan	80
7.	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi 2. Cakupan Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap 3. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas 4. Penambahan Jumlah Pustu 5. Penambahan Jumlah Pusling 6. Persentase jumlah kasus yang dirujuk 7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Tradisional 8. Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan obat di Puskesmas 9. Cakupan ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas	100 0 0 0 1 <5 100 100 85
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Dokter Umum 2. Jumlah Tenaga Dokter Gigi 3. Jumlah Perawat 4. Jumlah Bidan 5. Jumlah Ahli Gizi	42 29 350 345 66

1	2	3	4
		6. Jumlah Tenaga Sanitarian 7. Jumlah Apoteker 8. Cakupan Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Formal	61 21 50
9.	Meningkatnya ketersediaan Mutu Farmasi dan Makanan bagi Masyarakat	Persentase Pengawasan Mutu Obat, ketersediaan Farmasi dan Produk Pangan	85
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Tersedianya Jaringan Transportasi Darat yang memadai untuk meningkatkan Daya dukung, Kapasitas dan Kualitas Pelayanan serta Aksesibilitas Wilayah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya ruas jalan dalam kondisi baik pada kecamatan : 1. Kecamatan Titehena - Gerong – Tenawahang - Tuakepa 2. Kecamatan Tanjungbunga – Lamanabi – Latonliwo - Patisirawalang 3. Kecamatan Ile Boleng – Neleblolong 4. Kecamatan Witihama – Lewobuto - Dusun Meko – Desa Pledo 5. Kecamatan Demon Pagong – Lewokluok – Galu 6. Kecamatan Witihama – Waiwuring 7. Kecamatan Witihama - Oringbele – Lewokemie 8. Kecamatan Demon Pagong -Kawalelo – Nikotudeng – Lamika (TMD) 9. Kecamatan Solor Selatan Lewoggaran – Lebao – Liwo	4 km 4,2 km 0,25 km 0,25 km 0,89 km 1 km 1,04 km 5,67 km 1,74 km
2.	Tersedianya alat angkut yang memadai untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	16 unit
3.	Terpeliharanya peralatan berat, alat angkutan dan bengkel yang memadai untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah	Terpeliharanya alat- alat berat	15 Unit
4.	Tersedianya bangunan dan jaringan irigasi yang dapat mendukung perluasan areal potensial untuk pembangunan pertanian dan meminimalisir daya rusak air atau banjir, erosi dan abrasi	Jumlah saluran sungai/kali yang dinormalisasikan M ¹	1.000

1	2	3	4
5.	Tersedianya bangunan dan jaringan air bersih yang tersebar dan menjangkau pemenuhan kebutuhan masyarakat	Terbangunnya instalasi air minum / air bersih dan sanitasi yang menjangkau masyarakat	1.873 SR
6.	Tersedianya pembangunan/penyediaan sistem pengolahan air limbah terpusat skala pemukiman	Jumlah akses limbah domestik layak yang ditingkatkan	550 unit
7.	Tertatanya pembangunan perumahan yang layak dan penataan pemukiman yang berdimensi tata ruang	Pengolahan dan pengembangan sistem drainase	1 paket (1200 meter)
8.	Tertatanya pembangunan perumahan yang layak dan penataan permukiman yang berdimensi tata ruang	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	1 paket (100 unit)
4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh)Ha	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi 2. Jumlah rumah yang dibangun (koordinasi/konsultasi)	46 rumah 3 lokasi
2.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	581 Unit
3.	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah pembebasan tanah Pemda	12 bulan
4.	Retribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan	1. Jumlah tanah pemda yang difasilitasi 2. Jumlah bidang tanah yang difasilitasi 3. Jumlah lokasi yang dilakukan sosialisasi	25 bidang 3 bidang 4 kecamatan
5.	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	1. Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi 2. Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan 3. Jumlah tanah Pemda yang difasilitasi	6 kasus 5 kali 6 kasus
5.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
1.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pengamanan	12 bulan (pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa)

1	2	3	4
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah penegakan Perda 2. Frekuensi kegiatan dan operasi gabungan 3. Frekuensi bantuan keamanan operasi 4. Frekuensi pengamanan demonstrasi	5 Perda Operasi penertiban aset daerah dan operasi tipiring Perda No.4 tahun 2020 Operasi penyakit sosial masyarakat, PNS, pelajar 19 kecamatan (12 bulan) 19 kecamatan (12 bulan)
3.	Terwujudnya peran serta masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban	Jumlah Aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat.Limas)	40 orang 19 kecamatan
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	12 bulan
6.	BIDANG SOSIAL		
1.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Jumlah KK warga KAT yang didampingi, jumlah rumah adat yang diberikan bantuan 2. Jumlah KUBE yang diberdayakan 3. Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	3 unit 16 KUBE 16.431 KPM Bansos Pangan
2.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan 2. Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat yang diberdayakan	19 orang 20 karang taruna
3.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Jumlah lansia luar panti yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial 2. Jumlah panti/yayasan sosial yang mendapat bantuan 3. Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan	50 lansia 6 panti 100 penyandang disabilitas

1	2	3	4
		4. Jumlah anak sekolah yang mendapat sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya 5. Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan 6. Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 7. Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) 8. Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS/Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana	200 siswa/i 40 org eks 25 org disabilitas 3 ODK 25 klien
		9. Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan ketrampilan 10. Jumlah dokumen pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 11. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH 12. Jumlah orang yang mendapat pelayanan / bantuan makanan 13. Jumlah orang yang mendapat pelayanan / bantuan penanggulangan khusus 14. Jumlah orang yang mendapat pelayanan / bantuan dukungan psikologis 15. Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk 16. Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	30 orang 1 dokumen 4 kali 2.000 orang 70 orang 50 orang 10 KSB 41 orang
4.	Terpeliharanya monumen bersejarah	Terlaksananya pemeliharaan monumen bersejarah	1 lokasi

1	2	3	4
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
I.	BIDANG TENAGA KERJA		
1.	Penempatan tenaga kerja	1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan	1 dokumen 94 orang
2.	Hubungan industrial	1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	10 perusahaan/ Lembaga dan 20 perusahaan 15 kasus 6 dokumen
3.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penguatan infrastruktur soaial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman (bantuan ternak)	18 ekor
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Jumlah lembaga perempuan dan anak terbina 2. Jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi 3. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	19 lembaga 56 lembaga 20 %
3.	BIDANG PANGAN		
1.	Teratasinya masalah kerawanan pangan dan ketentuan pangan di masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	75 poktan

1	2	3	4
2.	Teratasinya masalah kerawanan pangan dan kerentanan pangan di masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	19 kecamatan
3.	Meningkatnya kemantapan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan konsumsi penduduk setiap waktu pada seluruh wilayah	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan masyarakat :	Skor PPH ketersediaan pangan 72,9%, peta akses pangan, NBM
4.	Meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi dengan pengembangan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi	1. Penyusunan, pemutakhiran dan analisa peta ketahanan pangan dan ketentraman pangan 2. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	250 desa/kelurahan 5 pasar utama
5.	Meningkatnya penyerapan pangan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 2. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 paket 19 kelompok wanita tani
4.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah 2. Jumlah usaha yang memiliki dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) 3. Jumlah penertiban kegiatan penambanagn tanpa izin (PETI) 4. Terlaksananya pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Jumlah sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (alat kebersihan/paket) 6. Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan 7. Jumlah TPA yang dikelola 8. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dokumen 100 usaha/ kegiatan 19 kecamatan 2 lokasi 1 paket 2 kelurahan 2 unit 1 dokumen

1	2	3	4
		9. Jumlah mata air yang dikonservasi dan luas hutan / lahan yang direhabilitasi / penghijauan 10. Jumlah sumber mata air yang dipantau 11. Jumlah kasus/layanan yang ditindaklanjuti 12. Jumlah usaha yang diawasi	5 Ha, 2 Ha 10 titik mata air (19 kecamatan) 10 kasus 13 usaha
5.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
1.	Terselenggaranya pelayanan pendaftaran pendudukan	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen pendaftaran penduduk	19 kecamatan
2.	Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen pencatatan sipil	19 kecamatan
3.	Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Tersedianya dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan 2. Tersedianya laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 3. Tersedianya dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan 4. Tersedianya dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan 5. Tersedianya laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	350 buku 5 laporan 5 dokumen 5 dokumen 1 laporan
6.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan	2 kelurahan
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	1. Terlaksananya pendampingan dan monev administrasi desa 2. Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa 3. Terlaksananya bimtek atau orientasi tugas kepala desa 4. Terlaksananya pendampingan penyusunan RPJM Desa 5. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa 6. Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa dan BPD	20 desa 20 desa 118 desa 118 desa 229 desa 229 desa

1	2	3	4
		7. Terlaksananya koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA) 8. Jumlah BUMDES/BUMDES bersama yang difasilitasi 9. Jumlah Bumdes yang didampingi (lanjutan) 10. Koordinasi pendampingan IDM	229 desa 10 desa 10 Bumdes 229 desa
3.	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di pedesaan dalam pembangunan	Jumlah Desa / Kel. siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	10 desa
4.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	1. Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi 2. Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/kelurahan	35 kelompok 10 desa
7.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Cakupan peserta KB aktif 2. Cakupan Akseptor baru	68% 70%
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	1. Jumlah lampu penerang jalan yang dipelihara 2. Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan umum yang dikeluarkan 3. Frekuensi pengujian kendaraan angkutan umum 4. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 5. Jumlah rekayasa lalu lintas 6. Jumlah lokasi operasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 7. Jumlah dokumen data base bidang perhubungan	400 unit 35 dokumen 609 kali 6 kali 8 kali 5 lokasi 1 dokumen
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayaran	1. Jumlah frekuensi pengendalian dan pengawasan armada angkutan laut dan lalu lintas penyebrangan 2. Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara	12 kali 2 unit
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana Bidang Komunikasi dan Informatika yang memadai	Cakupan layanan informasi	100%

1	2	3	4
2.	Meningkatnya system pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis Teknologi	Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	100%
3.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga IT	Tersedianya Tenaga IT yang berkualitas Tingkat Kabupaten	20 orang
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
1.	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi /KUD /UMKM yang dilatih	184 koperasi/KUD/UMKM
2.	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah kelompok sasaran	10 koperasi
3.	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Sosialisasi sinkronisasi sarasehan lomba asa terampil	16 koperasi
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	16 koperasi
5.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKU)	1. Jumlah fasilitas pengembangan UKM (gerobak kuliner) 2. Promosi produk UMKM	30 UMKM 2 UKM
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL		
1.	Jumlah potensi unggulan daerah yang dipromosi	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 3. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	4 kali 2 kali 4 kali
2.	Persentase system investasi yang dibangun	Tersedianya sistem pengembangan informasi penanaman modal	10 kali
3.	Peningkatan pelayanan perizinan	1. Terlaksananya pengurusan Perizinan 2. Terlaksananya sosialisasi Perizinan	2500 izin 19 kecamatan
12.	BIDANG KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA		
1.	Meningkatnya pemuda yang memiliki kemandirian dan berkarakter	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	100%
2.	Meningkatnya pemuda yang memiliki kecakapan hidup	Persentase pemuda yang memiliki kecakapan hidup	100%
3.	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	21%
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	31%

1	2	3	4
13.	BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	Pelestarian kesenian tradisonal	Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan (festifal dan seminar)	4 festival
2.	Pengelolaan kekayaan budaya	Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	4 objek
3.	Pembinaan sejarah lokal	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1 naskah
4.	Pengelolaan cagar budaya	Pengembangan cagar budaya	10 jenis
14.	BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Peningkatan kualitas SDM masyarakat Flores Timur dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat	1. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan, sekolah dan komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standar 2. Jumlah tenaga pustakawan sekolah yang mengikuti bimtek perpustakaan 3. Jumlah bahan pustaka yang diantar dan dikelola secara baik 4. Jumlah pemustaka yang mengunjungi/memanfaatkan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan daerah 5. Jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	19 perpustakaan 25 orang 1.500 buku 10.000 orang 4 desa
15.	BIDANG KEARSIPAN		
1.	Peningkatan kualitas Akses Pelayanan Kearsipan	1. Jumlah sasaran pembinaan kearsipan 2. Jumlah arsip yang dipelihara dan di movev 3. Jumlah pengolah kearsipan yang mengikuti bimtek 4. Jumlah pelaksanaan akusisi arsip OPD	19 kecamatan 130 box 30 orang 1 OPD
C.	URUSAN PILIHAN		
I.	BIDANG PERIKANAN		
1.	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Penurunan kasus ilegal ilegal fishing dan descrutif fishing 2. Jumlah biota laut yang dilindungi	10 kasus 15 ha

1	2	3	4
		3. Jumlah pokmaswas 4. Jumlah patroli bersama tim pengawasan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Jumlah sarana prasarana pengawasan	35 pokmaswas 7 kali 2 unit kendaraan roda dua
2.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Jumlah sarana prasarana penangkapan 2. Jumlah produksi tangkap 3. Jumlah benih ikan unggul dan non ikan	4 jenis 15,479,62 ton 2 jenis ikan unggul (tawar dan laut) 1 jenis non ikan (rumpun laut)
3.	Menguatnya kelembagaan kelompok usaha perikanan	1. Jumlah pembakul, pemasar, pengepul dan pengolah ikan 2. Jumlah pengepul dan pemasar yang difasilitasi 3. Jumlah kelompok pengolah ikan 4. Jumlah kelompok perikanan budidaya	520 kelompok 60 pengepul 45 kelompok 40 kelompok
4.	Meningkatnya diversifikasi dan mutu produk olahan kelompok usaha	1. Frekuensi pembinaan 2. Jumlah kelompok binaan 3. Produksi produk olahan hasil perikanan 4. Jumlah sarana prasarana peningkatan mutu tangkap dan olahan	14 kali 520 kelompok 4658,79 ton 2 jenis
5.	Meningkatnya PAD untuk mendukung PDRB Daerah sektor perikanan	Peningkatan PAD untuk mendukung PDRB Daerah sektor perikanan	Rp. 653.639.200,-
2. BIDANG PARIWISATA			
1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pengolahan destinasi pariwisata 2. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	4 destinasi 150 orang
2.	Pengembangan pemasaran pariwisata	1. Pelaksanaan penguatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	3 media

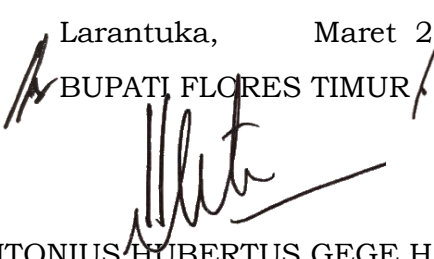
1	2	3	4
		2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kabupaten/Kota 3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	4 event 5 mitra
3.	Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1 kegiatan 4 mitra, 5 pelatihan, 1 kegiatan
3.	BIDANG PERTANIAN		
1.	Meningkatnya kapasitas produksi, produktifitas dan mutu produk komoditas tanaman hortikultura	Meningkatkan produksi komoditas pertanian unggulan tanaman hortikultura (Ton) 1. Siung Bawang Merah (pengembangan LP2B) 2. Belanja hibah uang (mendukung pengembang hortikultura	3.500 Kg 20 orang
2.	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian di wilayah potensial lahan basah dan kering untuk meningkatkan produktifitas pertanian	1. Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian dan ketahanan pangan - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi usaha tani - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PERDA LP2B) - Hibah barang kepada masyarakat (perlengkapan sumur) 2. Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian dan tanaman pangan a. Benih - Benih padi sawah - Benih jagung komposit b. Pupuk - Pupuk Urea - Pupuk NPK 3. Bahan pengemas / pengepak benih - Kantong plastik pengemas benih - Kantong plastik pengepak benih	1 unit 1 dokumen 1 paket 60 kg 40 kg 200 kg 400 kg 10 kg 50 buah

1	2	3	4
5.	BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah	1. Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar 2. Terlaksananya kegiatan sidang tera-tera ulang peralatan UTTP setiap tahun 3. Jumlah organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina 4. Tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan 5. Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya	4 kecamatan 4 kecamatan 95% 1 kali 8 kecamatan
6.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Meningkatnya kemandirian orang muda	1. Jumlah IKM yang terfasilitasi 2. Tercapainya pelayanan teknologi industri 3. Terbinanya dan tertatanya kelompok IKM 4. Jumlah IKM yang ditata strukturnya	25 Kelompok 15 kelompok 15 kelompok 7 kelompok
D.	URUSAN PENUNJANG		
1.	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Forkopimda (kali) 2. Jumlah dokumen LKPJ Kabupaten Flores Timur yang disusun (dokumen) 3. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (kali) 4. Terlaksananya pembinaan manajemen kecamatan, monitoring pelaksanaan PATEN dan Kepamongprajaan (kecamatan) 5. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa (kec, kel/desa)	100% 100% 100% 100% 100%

1	2	3	4
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis. Kebijakan teknis di Bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah dokuemen sistem dan prosedur pengawasan	3 dokumen
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pembrantasan korupsi	18 kali
3.	BIDANG PERENCANAAN		
1.	Meningkatnya efisensi dan efektifitas pengelolaan program dan kegiatan	% capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya	98%
2.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di BPPPPD	% penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun	98%
3.	Meningkatnya kualiatas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% aparatur Bapeda berpendidikan S1 dan S2	80%
4.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain RKPD Penetapan, RKPD Perubahan	3 dokumen
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% katerlibatan masyarakat dalam Musrenbangkab	100%
6.	Meningkatnya Sarana Prasarana serta Fasilitas Perencanaan Pembangunan dengan Stakeholders	Jumlah aplikasi sistem perencanaan yang dikelola	1 aplikasi (SIPD)
7.	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO, PT, Lembaga Donor	14 LSM/NGO, PT, Lembaga Donor
8.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen Evaluasi Pembangunan (Evaluasi program pembangunan tahunan)	1 dokumen
9.	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi (Buku Profil Daerah)	1 dokumen
10.	Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan	% program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan	90%

1	2	3	4
10.	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	% hasil penelitian kajian dan lain-lain	90%
4.	BIDANG KEUANGAN		
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepatwaktu, transparan dan akuntabel	1. Ketepatan waktu penetapan Perda APBD 2. Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD 3. Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5. Rata – rata waktu penyelesaian SP2D 6. Persentase kesesuaian data rinciandan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda 7. Persentase bidang tanah yang bersertifikat 8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Tepat Tepat Tepat 2 hari 100% 80% WTP
2.	Meningkatnya realisasi PAD terhadap target PAD	Persentase Realisasi PAD	100%
3.	Meningkatnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap APBD	96,70%
5.	BIDANG KEPEGAWAIAN		
1.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai Tugas Fungsi	1. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional 2. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	- 6 orang
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Diklat Tugas dan Fungsi dan Diklat Fungsional	1. Jumlah calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 2. Terlaksananya rapat Koordinasi tingkat kepegawaian	168 CPNS -
3.	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur	1. Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier 2. Jumlah pengadaan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3. Jumlah rencana formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun	300 orang / dokumen 500 orang 500 formasi
4.	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	1. Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNSD 2. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	20 kasus 20 orang

1	2	3	4
5.	Meningkatnya jenjang pendidikan ASN sesuai kebutuhan daerah	Jumlah Mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	100 orang
.6	Terwujudnya layanan kepegawaian yang cepat dan akurat	1. Jumlah PNS yang mengalami kenaikan Pangkat, Berkala, Impasing dan PMK 2. Jumlah PNS yang mendapatkan SK Pensiun 3. Jumlah data dan dokumen kepegawaian yang tertata 4. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI 5. Jumlah PNS yang memiliki Taspen, KPE dan Karis / Karsu 6. Tercapainya penempatan, pengangkatan / inpasing / perpindahan jabatan fungsional	2.380 orang 150 orang 5.800 file 100 orang 500 kartu 500 berkas

Larantuka, Maret 2022

 BUPATI FLORES TIMUR.
 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan Prosedur Kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur; (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP-AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai standarisasi prosedur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menjamin konsistensi pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun prosedur;
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh ASN dalam melaksanakan tugas;
- g. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN dalam melaksanakan tugas;

- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- i. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; dan
- j. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. Kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh ASN.
- b. Efisiensi dan efektifitas
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- c. Keselarasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.
- d. Keterukuran
Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilan.
- e. Dinamis
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan *kepuasan* kepada pengguna.
- g. Kepatuhan hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan *sesuai* Peraturan Perundang-undangan.
- h. Kepastian hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subyek dan Obyek; dan
- b. Jenis SOP-AP.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah ASN.
- (2) Obyek SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah setiap jenis tugas dan fungsi ASN.

BAB IV
JENIS STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan manasik haji; dan
 2. Pemberian bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran.
 - b. Bagian Pemerintahan Umum:
 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur; dan
 3. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
Penyusunan Naskah Sambutan/pidato Bupati/Wakil Bupati Flores Timur.
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Pengiriman Paket Lelang;
 2. Pendistribusian Paket Lelang;
 3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 4. Pengiriman Hasil Lelang;
 5. Pengarsipan Paket Lelang;
 6. Kaji Ulang Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Barang dan Jasa;
 7. Pendaftaran Penyedia;
 8. Pengajuan Perubahan Data Penyedia;
 9. Perubahan Jadwal Lelang;
 10. Pemeriksaan Fisik Lelang; dan
 11. Penanganan Sanggah dan Pengaduan.
 - e. Bagian Hukum:
 1. Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Pembentukan Peraturan Daerah;
 3. Pembentukan Peraturan Bupati;

4. Pembentukan Keputusan Bupati;
 5. Penanganan Perkara;
 6. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa;
 7. Pembentukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 8. Penyusunan Nota Kesepahaman;
 9. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama;
 10. Penyusunan Lembaran Daerah;
 11. Penyusunan Berita Daerah; dan
 12. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah.
- f. Bagian Organisasi:
1. Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur;
 2. Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Flores Timur;
 3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 4. Penyusunan Dokumen Informasi Jabatan Kabupaten Flores Timur;
 5. Penyusunan SOP-AP Daerah;
 6. Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
 7. Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Format Identitas SOP-AP dan Bagan Alir (*Flowcharts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

SOP-AP yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini karena kekhususannya, tetap mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai SOP-AP Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

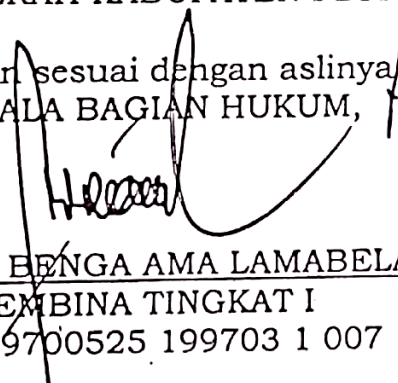
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

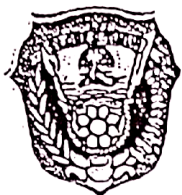
ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP

:

Tanggal Pembuatan

:

Desember 2017

Tanggal Revisi

:

November 2018

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BUPATI FLORES TIMUR

Nama SOP

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten 11 Nomor 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peringatan

1. Pelaporan LKIP memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman LKIP ke Provinsi, Kemenpan dan RB, Kemendagri dan Bappenas

Kualifikasi Pelaksana

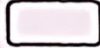
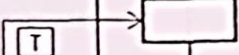
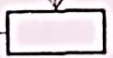
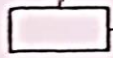
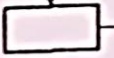
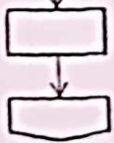
1. Sarjana Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negara/ Hukum
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada persoalan yang ada
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

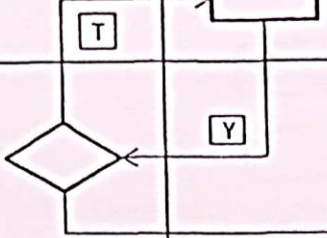
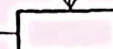
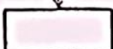
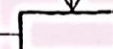
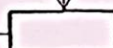
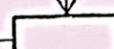
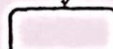
Peralatan/Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Peraturan Perundangan-undangan terkait, Lembar Kerja/Rencana Kerja

Pencatatan & Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy
2. Pada proses penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Bagian Organisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tim Sekretariat	Tim Penyusun LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur					SK Bupati	15 menit	SK Bupati	Pembentukan Tim dengan SK Bupati
2	Mengonsep surat untuk dikirim kepada SKPD dalam rangka permintaan data kinerja dan Laporan Kinerja SKPD					Konsep Surat Keluar	10 menit	Konsep Surat Keluar	Surat dikonsep Kasubag
3	Mengoreksi surat untuk yang dikonsep Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Konsep Surat Keluar	5 menit	Konsep Surat Keluar	Surat telah dikoreksi Kabag
4	Mengetik surat, mengagendakan dan mendistribusikan surat kepada SKPD dan Tim Penyusun dalam rangka permintaan LKIP SKPD serta Rapat awal penyusunan LKIP					Surat Keluar	30 menit	Surat Keluar	Surat siap didistribusi ke SKPD dan Tim Penyusun
5	Memberi petunjuk penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja dan Staf Bagian Organisasi					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	15 Menit	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
6	Memberikan pelayanan kepada SKPD terkait konsultasi penyusunan Laporan Kinerja SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
7	Menerima dan menghimpun dokumen LKIP dari semua SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten

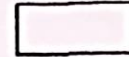
8	Menyusun draf dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Laporan Kinerja SKPD		Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyusunan Draf awal LKIP Kabupaten Flores Timur
9	Mengoreksi draf awal dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama TIM Penyusun LKIP Kabupaten Flores Timur		Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab.Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab.Flores Timur yang sudah dikoreksi
10	Melaksanakan proses penyempurnaan dan perbaikan atas draf LKIP antara lain: Pembahasan terkait finalisasi penyusunan dan rencana kerja TIM, Menganalisa RPJMD dan RENSTRA SKPD, Menyempurnakan draf awal LKIP		Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab.Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab.Flores Timur yang sudah diperbaiki dan disempurnakan
11	Mengirim dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Inspektorat Kabupaten untuk direview		Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur siap direview
12	Melakukan perbaikan/finalisasi dokumen LKIP sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Flores Timur		Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Finalisasi Dokumen LKIP Kab Flores Timur
13	Mengetik surat pengantar penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur di tingkat Provinsi dan Pusat setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Flores Timur		Surat Pengantar Penyampaian LKIP	15 Menit	Surat Pengantar Penyampaian LKIP	Surat Pengantar Penyampaian LKIP di tingkat Provinsi dan Kementerian
14	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang		Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	4 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Provinsi
15	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas RI di Jakarta		Dokumen LKIP kabupaten Flores Timur	5 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Pusat

KETERANGAN SIMBOL FLOWCHARTS:

1. Simbol Kapsul



2. Simbol Kotak



3. Simbol Belah Ketupat



4. Simbol Segilima



5. Simbol AnakPanah



Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekutif

Kegiatan pengambilan keputusan

Pindah Halaman

Alur Proses

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TK. I

NIP. 19700525 199703 1 007